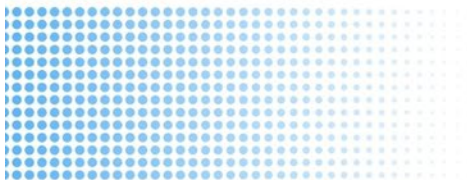




LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
2025
DIREKTORAT
PENGOLAHAN



DIREKTORAT
JENDERAL
PENGUATAN DAYA
SAING

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat Pengolahan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada KKP.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 adalah Rancangan Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

Kegiatan utama Direktorat Pengolahan yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP yaitu, (a) Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%), (b) Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%), (c) Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP (%), (d) Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton), (e) Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (f) Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Prociuk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen), (g) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (h) Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (i) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat

Pengolahan (Persen), (j) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai), (k) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks). Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 107,25% (kategori baik). Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2025

Direktur Pengolahan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si

Tim Penyusun

PENGARAH

Direktur Pengolahan

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Pengolahan

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Pengolahan,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pengolahan selama Triwulan II Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Pengolahan melakukan pengukuran terhadap kegiatan Pengolahan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan; (2) Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan; (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 3 IKK bersifat tahunan, 5 IKK bersifat triwulan, 3 IKK bersifat semesteran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI, Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP, Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Indikator yang bersifat semesteran adalah Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan,

Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan, Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sebelas (11) Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan II adalah sebesar 107,25 (kategori baik). Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang targetnya ada pada Triwulan II. Adapun rincian capaian periode triwulan II yaitu sebagai berikut :

- IKK Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%); target 68,70 %; capaian 74,27% atau 108,11%.
- IKK Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%); target 50%; capaian 50% atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (%); target 10%; capaian 14,83% atau 120,00% dari target.
- IKK Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton); target 1,67%; capaian 1,95% atau 120,00%.
- IKK Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (%); target 30%; capaian 30% atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 95%; capaian 100% atau 105,26% dari target.
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan; target 82%; capaian 84,23% atau 102,72%.

Sehubungan dengan tindak lanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Pengolahan mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp 15.262.197.000,- dari pagu semula Rp 16.829.050.000,- menjadi Rp 1.566.853.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024. Adapun realisasi anggaran

sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 437.933.194,- atau setara dengan 27,95% dari pagu setelah AA. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dicapai selama Triwulan II Tahun 2025 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan II Tahun 2025, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
Tim Penyusun	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.Tugas dan Fungsi	2
1.4.Keragaan Sumberdaya Manusia.....	4
1.5.Permasalahan Utama	4
1.6.Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1.Rencana Strategis	7
2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1.Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan	10
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	12
IK 1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	12
IK 2. Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI.....	24
IK 3. Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP	34
Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan.....	40
IK 4. Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	40
IK 5. Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan	48
IK 6. Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah	54
IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	64

IK 8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan	66
IK 9. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan.....	66
IK 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan..	69
IK 11. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	70
BAB IV PENUTUP.....	72
4.1.Kesimpulan	72
4.2. Permasalahan.....	73
4.3. Permasalahan.....	73
4.4. Lampiran	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025	8
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025	11
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	13
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI	25
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP	34
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan.....	41
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan	49
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah.....	55
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	65
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan.....	66
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan	67
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan.....	69
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan	4
Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia	4
Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	6
Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW II Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku	10
Gambar 5. Audiensi dengan Asosiasi Perikanan dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan Efisiensi	15
Gambar 6. Diskusi Dengan BPOM Terkait Peningkatan Kinerja UPI Melalui Harmonisasi Sertifikasi	15
Gambar 7. Diskusi awal tentang Rendemen Rumput Laut dengan Stakeholder terkait	16
Gambar 8. Pembinaan kepada PT. Satya Trinadi Komira Perkasa Terkait Program Holding UMKM	17
Gambar 9. Pembinaan di Poklamsar Saluyu Foods dan Poklamsar Flamboyan	18
Gambar 10. Pembinaan di PT. Inovasi Ikan Nusantara dan CV. Sakana Indo Prima	18
Gambar 11. Pembinaan UPI Skala Mikro dan Kecil Melalui Pembinaan Jarak Jauh	20
Gambar 12. Pembinaan UPI Skala Mikro dan Kecil Melalui Klinik Mutu	21
Gambar 13. Webinar Sterilisasi Produk Perikanan: Strategi UMKM Menembus Pasar Global	22
Gambar 14. Webinar Kupas Tuntas Pentingnya Label dan Kemasan produk Perikanan	23
Gambar 15. Webinar Kupas Tuntas Sertifikasi Halal Produk Perikanan	24
Gambar 16. Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan	27
Gambar 17. Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan	28
Gambar 18. Rapat Teknis Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 2025	29
Gambar 19. Rapat Identifikasi Potensi Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan	29
Gambar 20. Rapat Koordinasi Pemantauan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan	30
Gambar 21. Sosialisasi Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan	32

Gambar 22. Rapat Persiapan Konsensus RSNI3 Produk Perikanan	33
Gambar 23. Rapat Konsensus RSNI Produk Perikanan	34
Gambar 24. Penyusunan Kriteria Pembina Mutu HACCP.....	36
Gambar 25. Koordinasi Sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	37
Gambar 26. Training Pembina Mutu <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>	39
Gambar 27. Rapat Koordinasi Program Pembinaan HACCP.....	40
Gambar 28. Rapat Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar	43
Gambar 29. Rapat Lanjutan Dalam Rangka Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar.....	44
Gambar 30. Pembahasan Juknis Pendataan Subbab Volume Produk Olahan Skala Menengah Besar.....	44
Gambar 31. Diskusi Penyusunan Pedoman Penghitungan Volume Produk Olahan (VPO) dan Utilitas pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah Besar (MB)	45
Gambar 32. Penetapan Populasi VPO dan Cleansing Data	46
Gambar 33. Pencermatan pada e-Katalog Versi 6.....	52
Gambar 34. Rapat Penyusunan Dokumen Pembukaan Blokir Anggaran	53
Gambar 35. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan CF melalui Mekanisme E-Katalog versi 6	54
Gambar 36. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Corndog Ikan Nila	58
Gambar 37. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Dimsum Udang Rumput Laut.....	59
Gambar 38. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi Mantao Ikan Nila	61
Gambar 39. Sosialisasi Pengolahan Hasil Laut	62
Gambar 40. Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan.....	63
Gambar 41. <i>Factory Trial</i> Produk HPI di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Pengolahan merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang mengejawantahkan dari Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029 yang disusun sebagai acuan kegiatan dalam kurun waktu periode lima tahunan. Mendukung hal tersebut, Direktorat Pengolahan turut serta menyusun Perjanjian Kinerja yang mencakup turunan dari Renstra 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu, (a) Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%), (b) Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%), (c) Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP (%), (d) Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton), (e) Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (f) Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Prociuk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen), (g) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (h) Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (i) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (j) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai), (k) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks). Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengolahan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Upaya mewujudkan akuntabilitas organisasi Direktorat Pengolahan Menyusun laporan Kinerja baik secara periodik triwulan maupun tahunan. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan pada indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengolahan akan menyampaikan capaian realisasi kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan menyusun “Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat Pengolahan 2025”.

1.2.Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan publik;
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3.Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 02/PERMENKP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan

hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengolahan.

Direktorat Pengolahan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 7 Tim Kerja, sebagai berikut :

- a. Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar;
- b. Tim Kerja Pengembangan Layanan Kelayakan Pengolahan;
- c. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan;
- d. Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah;
- e. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar;
- f. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil;
- g. Tim Kerja Dukungan Manajerial.



Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan

1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan pada Tahun 2025 berjumlah 70 orang dengan komposisi 49 orang PNS, 13 orang PPPK, dan 8 orang Non ASN. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 32 orang dan Wanita sebanyak 38 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang, jumlah Golongan II/c sebanyak 2 orang, II/d sebanyak 1 orang, III/a sebanyak 2 orang, III/b sebanyak 7 orang, III/c sebanyak 5 orang, III/d sebanyak 13 orang, IV/a sebanyak 10 orang, IV/b sebanyak 5 orang, IV/c sebanyak 2 orang, IV/d sebanyak 1 orang, IV/e sebanyak 1 orang. Non golongan ada 21 orang.



Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar,

persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Ke depan, pembinaan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian sertifikasi perlu terus digenjut, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

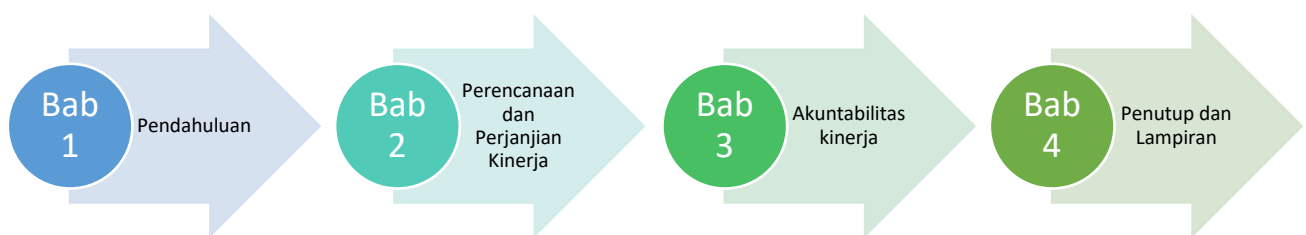
Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Jumlahnya mencapai 81.350 unit, sementara UPI skala menengah dan besar hanya 1.475 unit. Akibatnya mereka kurang bisa bersaing terutama dalam pemodalan dan ekspansi usaha, meskipun kebijakan berpihak kepada mereka. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis produk KP yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah fasilitasi akses pembiayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha, sehingga membantu perluasan usaha dan jaringan kerjasama UPI.

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terutama di pasar ekspor. Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh Indonesia, padahal posisinya sangat vital sebagai pelopor mutu dan pengembangan pasar terutama di wilayah Indonesia yang aksesnya terbatas. Pembina Mutu dan Analis Pasar akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer *knowledge* berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP,

Traceability) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih luas Ditjen PDSKP dapat mengakomodasinya, melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk KP, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk KP di pasar potensial dalam dan luar negeri.

1.6.Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Triwulan II Tahun 2025. Pencapaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2025 yang terealisasi dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan II Tahun 2025 diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rancangan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

1. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
2. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, dan outcome). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan

berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2025-2029. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025

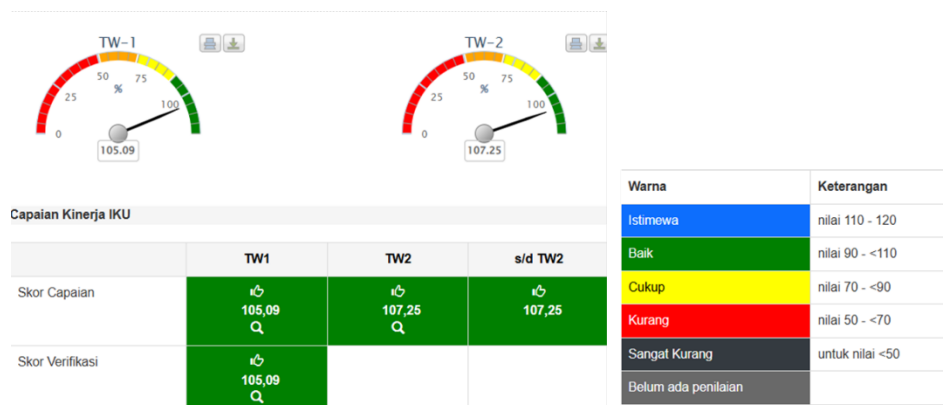
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,7
		2.	Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (Persen)	100
		3.	Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (Persen)	100
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	4.	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton)	3,71
		5.	Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	80
		6.	Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen)	100
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	81
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2025
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	87

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan

Direktorat Pengolahan memiliki 11 indikator kinerja yang terdiri dari 3 indikator kinerja bersifat tahunan, 3 indikator kinerja bersifat semesteran, 5 indikator kinerja bersifat triwulanan. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dari April sampai dengan Juni 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerjaku pada triwulan II sebesar 107,25. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 adanya kenaikan 2,16 poin atau 2,05%, dan jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 4,26 poin atau 4,13%.



Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW II Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target		Realisasi		% Terhadap Target	
				Tahun 2025	TW II	Tahun 2025	TW II	Tahun 2025	TW I
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,7	68,70		74,27	108,11%	108,11%
		2.	Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (Persen)	100	50		50	50,00%	100,00%
		3.	Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibangun Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (Persen)	100	10		14,83	14,83%	120,00%
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	4.	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton)	3,71	1,67		1,95	52,56%	116,77%
		5.	Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	80					
		6.	Persentase Pelaku Usaha yang dibangun Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen)	100	30		30,00	30,00%	100,00%

3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95	95		100	105,26%	105,26%
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100					
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	81					
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86					
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	87	82		84,23	96,82%	102,72%

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

IK 1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

Realisasi produksi dibandingkan dengan kapasitas produksi terpasang pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah dan Besar. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan

ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumutan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumput Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	s.d. TW I 2025			TW I 2025	TW II 2024
Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,70	-	68,00	68,70	74,27	-	68,12	74,27	108,11	108,11	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan II 2025 capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen) adalah sebesar 74,27%. Capaian tersebut setara dengan 108,11% terhadap target Triwulan II 2025 yaitu 68,70% atau setara dengan 109,22% terhadap target Triwulan II 2024. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 68,70%, maka capaian Triwulan II 2025 telah mencapai 108,11%. IK tersebut capaiannya dimulai pada Triwulan II, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 267.578.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp 91.486.900,- atau sebesar 34,19% dari pagu anggaran.

Faktor Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II, yaitu:

- Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kelayakan dasar penanganan dan pengolahan serta sertifikasi produk perikanan.
- Permasalahan sebagai objek pembinaan yang dialami UPI MB terkait kinerja UPI sangat beragam dan seringkali lintas sektor.

Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II, yaitu:

- Capaian output pembinaan terhadap UPI skala mikro dan kecil dapat dilaksanakan sesuai target.
- Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan TW II adalah adanya koordinasi yang cukup baik antar unit kerja, K/L, maupun asosiasi.

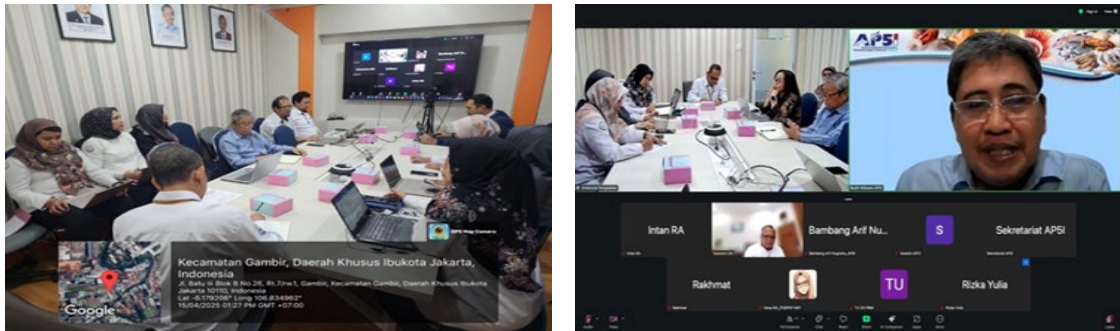
Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya, yaitu:

- Pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha perikanan perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pembinaan langsung agar produk aman, dipercaya, dan bisa bersaing di pasar.
- Sinergi dan kolaborasi dengan pihak terkait seperti K/ L terkait, Pemda, pelaku usaha, asosiasi, dan akademisi perlu dipertahankan dan diperkuat.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Audiensi dengan Asosiasi Perikanan dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan Efisiensi

Audiensi dilakukan pada 15 April 2025 untuk meningkatkan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan beberapa asosiasi pengolahan produk perikanan secara *hybrid*. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Pengolahan dan beberapa ketua asosiasi. Permasalahan utama UPI meliputi: pentingnya kontinuitas bahan baku dari segi kuantitas, kualitas, dan harga; tumpang tindih regulasi yang menambah biaya produksi; banyak produk perikanan yang belum sesuai regulasi label; dan persaingan tidak sehat dari tingkat *glazing fillet* patin yang beragam. UPI juga menghadapi kesulitan dengan kebijakan tarif dari Amerika Serikat, pasar utama untuk udang, tuna, dan rajungan. Pembebasan kuota impor terbatas untuk bahan baku perlu dipertimbangkan, tetapi pembebasan untuk produk jadi dapat berdampak negatif. Untuk pembinaan UPI, perlu kolaborasi dengan instansi lain agar lebih efisien.



Gambar 5. Audiensi dengan Asosiasi Perikanan dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan Efisiensi

2. Diskusi Dengan BPOM Terkait Peningkatan Kinerja UPI Melalui Harmonisasi Sertifikasi

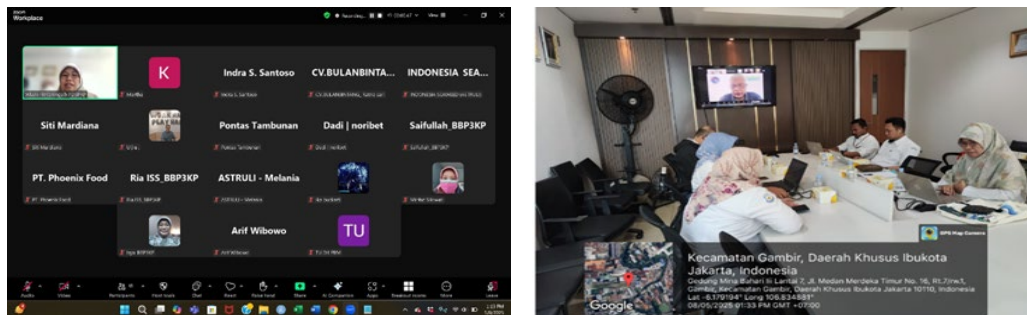
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 dihadiri oleh Direktur Pengolahan dan Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM. Pertemuan ini bertujuan untuk memperbarui proses harmonisasi sertifikat antara KKP dan BPOM, seperti Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Ditekankan bahwa proses sertifikasi tidak dimaksudkan untuk menyulitkan pelaku usaha. Walaupun SKP dan CPPOB berlandaskan regulasi berbeda, ada item yang dapat saling digunakan dalam audit untuk mengurangi tumpang tindih. Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ada untuk harmonisasi penilaian telah berakhir pada 2023 dan perlu diperpanjang. Selain itu, pelaku usaha mengeluhkan kebingungan mengenai izin edar. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan antara instansi dan pelaku usaha mengenai kewenangan penerbitan izin edar. BPOM siap mendukung sosialisasi mengenai sertifikasi dan izin edar. Tindak lanjut mencakup koordinasi untuk perpanjangan PKS, identifikasi item audit, dan sosialisasi bersama seluruh instansi.



Gambar 6. Diskusi dengan BPOM terkait Peningkatan Kinerja UPI melalui Harmonisasi Sertifikasi

3. Diskusi awal tentang Rendemen Rumput Laut dengan Stakeholder terkait

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025, secara *hybrid* melalui *zoom meeting*. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kinerja Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL). Rapat dihadiri oleh perwakilan dari berbagai pihak, termasuk Direktorat Pengolahan, pelaku usaha, dan akademisi. Pentingnya rendemen, yang menunjukkan efisiensi produksi, dibahas. Diskusi menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menetapkan metode penghitungan yang fleksibel, pemetaan data, uji coba sistem penghitungan, dan acuan rendemen dalam SNI.



Gambar 7. Diskusi awal tentang Rendemen Rumput Laut dengan Stakeholder terkait

4. Pembinaan kepada PT. Satya Trinadi Komira Perkasa Terkait Program Holding UMKM

Rapat penetapan populasi VPO UPI MB dan cleansing data berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025. Rapat ini dipimpin oleh Katimja PUP2MB dan dihadiri oleh perwakilan Bagian Data dan Layanan Publik Ditjen, serta Timja dari Direktorat Pengolahan. Populasi UPI MB Tahun 2025 ditetapkan berjumlah 1.520 UPI setelah koordinasi dengan instansi terkait. Cleansing data dilakukan untuk mengelompokkan komoditas ke dalam 13 jenis kegiatan pengolahan ikan, berdasarkan data lalu lintas domestik. Sebanyak 30.000 data mentah perlu dibersihkan, namun sekitar 2.000 data tidak dapat diidentifikasi karena kurangnya informasi. Beberapa kesepakatan dalam cleansing antara lain penggunaan filter transportasi, pengelompokkan produk tertentu, dan konversi satuan box menjadi kilogram. Kesimpulan dari rapat ini termasuk perlunya penetapan kerangka *sample* dan lanjutan cleansing data dari 30.000 ke 2.000 data.



Gambar 8. Pembinaan kepada PT. Satya Trinadi Komira Perkasa Terkait Program Holding UMKM

5. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Melalui Kunjungan Lapangan

Kegiatan pembinaan melalui kunjungan lapangan dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu, Kab. Sukabumi: 16 - 17 Mei 2025 dan Kab. Bogor dan Depok: 13 Juni 2025. Peserta yang hadir dalam kegiatan pembinaan adalah Kab. Sukabumi: Poklahsar Saluyu *Foods*, Poklahsar Flamboyan, Dinas Perikanan Kab. Sukabumi dan tim pembina mutu Direktorat Pengolahan; Kab. Bogor: PT. Inovasi Ikan Nusantara dan tim pembina mutu Direktorat Pengolahan; Kab. Depok: CV. Sakana Indo Prima, Dinas Perikanan Kota Depok dan tim pembina mutu Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas produksi salah satunya melalui program bantuan DAK Bedah UPI dan penerapan mutu program kelayakan dasar *Good Manufacturing Practices* (GMP) bagi UPI Skala Mikro dan Kecil. Berikut beberapa hasil dari pembinaan, yaitu:

- Poklahsar Saluyu *Foods* terletak di Desa Sukaraja, mengolah ikan nila menjadi produk seperti brownies dan keripik. Dikelola oleh Ibu Nurhasanah, kelompok ini memiliki legalitas usaha lengkap dan mempekerjakan 7 orang. Rehabilitasi bangunan telah meningkatkan produksi dan kualitas higienis.
- Poklahsar Flamboyan, yang juga di Sukaraja dan dikelola oleh Ibu Komalasari, fokus pada dendeng belut. Dengan 7 tenaga kerja, kelompok ini juga memiliki izin lengkap dan telah optimal dalam pemanfaatan bangunan dan peralatan. Mereka berkomitmen meningkatkan kualitas produk.
- PT. Inovasi Ikan Nusantara, berdiri sejak 2019 di Kabupaten Bogor, memproduksi teri dan udang, serta inovasi kulit patin. Tenaganya berkembang dari 5 menjadi 20 orang, dengan omset Rp 300 juta/hari. Di tahun 2024 mereka

berganti nama dan lokasi, memerlukan dukungan untuk legalitas dan sertifikasi produk.

- CV. Sakana Indo Prima, berdiri tahun 2009 di Depok, memproduksi bakso ikan tuna dan diversifikasi produk frozen food. Dengan 10 tenaga kerja, mereka berencana membeli mesin baru untuk produksi.

Poklahsar Saluyu Foods dan Flamboyan membutuhkan pelatihan keuangan, pemasaran digital, serta akses permodalan. Direktorat Pengolahan akan membantu legalitas usaha PT. Inovasi Ikan Nusantara dan Sakana Indo Prima.



Gambar 9. Pembinaan di Poklahsar Saluyu Foods dan Poklahsar Flamboyan



Gambar 10. Pembinaan di PT. Inovasi Ikan Nusantara dan CV. Sakana Indo Prima

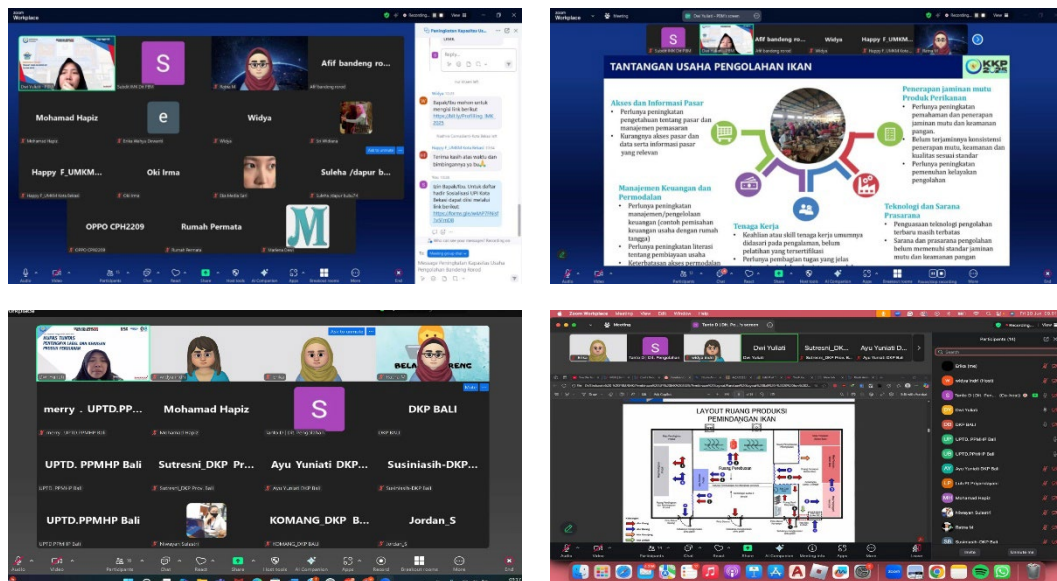
6. Pembinaan UPI Skala Mikro dan Kecil Melalui Pembinaan Jarak Jauh

Kegiatan pembinaan melalui pembinaan jarak jauh dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu, Kab. Bulungan: 16 - 17 Mei 2025, Kab. Bekasi: 2 Mei 2025, Provinsi Bali: 20 Juni 2025. Kegiatan pembinaan dihadiri oleh, Kab. Bulungan: Poklahsar Gastis, Poklahsar Gulama, Poklahsar Wanita Usaha Mandiri, Poklahsar Sumber Rejeki, Poklahsar Wardami, Dinas Perikanan dan Tim Pembina Mutu Direktorat Pengolahan; Kab. Bekasi: Poklahsar Bandeng Rorod, Genki's Kitchen, Aracan,

Sabrina Cassava, Dimsum Uwais 58, Dapur Bubu74, Happy InStore dan Tim Pembina Mutu Direktorat Pengolahan; Provinsi Bali: perwakilan dari DKP Provinsi Bali, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Bali dan pelaksana Tim Kerja PUP2MK. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi (legalitas usaha, layout produksi dll) serta penerapan mutu program kelayakan dasar *Good Manufacturing Practices* (GMP) bagi UPI Skala Mikro dan Kecil. Berikut beberapa hasil dari pembinaan, yaitu:

- Kabupaten Bulungan melakukan pembinaan dengan asistensi terhadap lima layout untuk kegiatan Bedah UPI, sesuai standar pencegahan kontaminasi silang dan efektivitas produksi. Pembahasan juga mencakup RAB dengan masukan untuk barang dan pekerjaan yang perlu disediakan.
- Kab. Bekasi, diidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMK pengolahan perikanan, seperti keterbatasan pengetahuan tentang pengolahan dan sertifikasi produk, serta sarana yang kurang memadai. Ada juga masalah akses pembiayaan dan pemasaran yang terbatas.
- Provinsi Bali, prinsip dasar layout higienis meliputi pemisahan area bersih dan kotor, alur produksi satu arah, serta penggunaan bahan yang mudah dibersihkan. Karyawan diharapkan menerapkan sanitasi yang baik. Layout di rumah produksi akan disesuaikan dengan kondisi dan anggaran.

Kab. Bulungan perlu memperbaiki *layout* yang nantinya dibahas dan dikomunikasikan oleh BPOM terkait izin edar. Kab. Bekasi, perlu melakukan pendataan UMK dan koordinasi untuk pembinaan dan akses pembiayaan. Provinsi Bali akan menggunakan hasil dari asistensi untuk melakukan pembinaan UMKM agar memenuhi standar higienis dan legalitas pangan.



Gambar 11. Pembinaan UPI Skala Mikro dan Kecil Melalui Pembinaan Jarak Jauh

7. Pembinaan UPI Skala Mikro dan Kecil Melalui Klinik Mutu

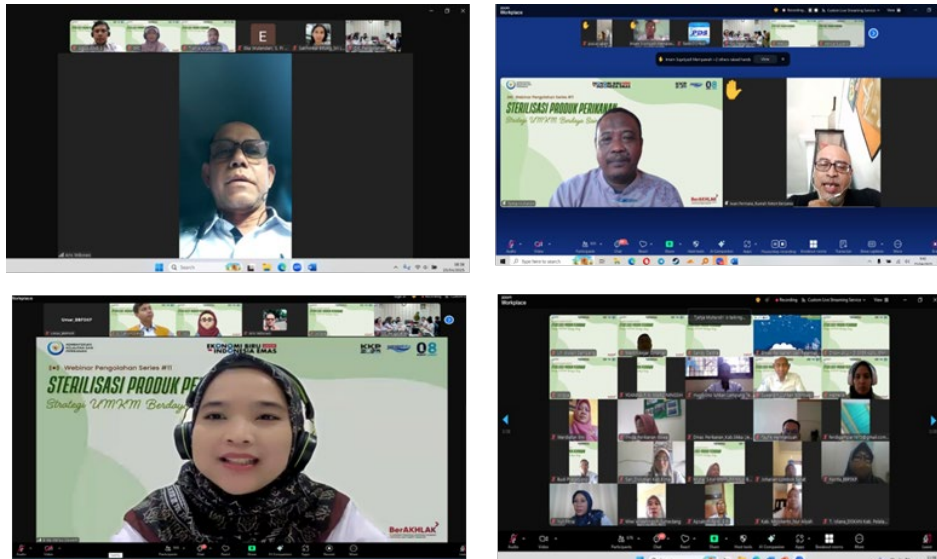
Kegiatan pembinaan melalui kegiatan klinik mutu dilaksanakan pada kegiatan bazar KKP setiap bulan yaitu, Mei: 14 - 15 Mei 2025, Juni: 4 - 5 Juni 2025. Peserta kegiatan adalah para pelaku usaha yang ikut serta dalam pelaksanaan bazar KKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan Klinik Mutu adalah melakukan pemantauan mutu hasil perikanan dan pembinaan terhadap UMKM yang mengikuti bazar. Klinik Mutu hadir untuk memantau kualitas hasil perikanan dan mendukung UMKM yang berpartisipasi dalam bazar. Klinik ini juga berfungsi sebagai tempat konsultasi untuk membantu UMKM dengan masalah mutu dan keamanan produk. Terdapat beberapa temuan pada hasil pemantauan dibulan Mei diantaranya, beberapa tenant belum memiliki SKP, MD, dan SNI, serta label produk tidak mencantumkan tanggal produksi dan kedaluwarsa. Beberapa kemasan tidak kedap udara, produk beku dipajang di luar *freezer* sehingga meningkatkan risiko penurunan kualitas. Pada bulan Juni, dilakukan uji organoleptik dan suhu, dan sebagian besar tenant sudah menerapkan sistem rantai dingin, namun masih ada yang belum membawa *chest freezer*. Tenant diharapkan tetap menjaga sistem rantai dingin, mencantumkan tanggal produksi dan kedaluwarsa dengan label tahan lama, dan memperhatikan kemasan saat proses vakum. Tenant yang belum memiliki PIRT dan SKP harus menghubungi Dinas terkait.



Gambar 12. Pembinaan UPI Skala Mikro dan Kecil Melalui Klinik Mutu

8. Webinar Sterilisasi Produk Perikanan: Strategi UMKM Menembus Pasar Global

Kegiatan webinar dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan Youtube Ditjen PDSPKP. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota, Pembina Mutu, Penyuluh Perikanan, pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya UPI skala mikro dan kecil, akademisi, dan masyarakat umum sebanyak 987 peserta. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah menyajikan informasi lengkap tentang pengawetan produk perikanan menggunakan teknik sterilisasi, mengidentifikasi teknik sterilisasi yang sesuai untuk produk perikanan, menjelaskan persyaratan suhu, pH, dan teknik pengemasan yang efektif, dan memberikan panduan bagi pelaku usaha perikanan dalam penerapan pengawetan produk perikanan. Narasumber webinar adalah Tjahja Muhandri dari IPB University, yang membahas prinsip pengawetan produk pangan melalui sterilisasi untuk UMKM. Ia menjelaskan teknik dan alat sterilisasi serta jenis kemasan. Pada saat sesi tanya jawab interaktif, banyak pertanyaan yang belum dapat terjawab. Peserta dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut di grup WhatsApp atau call centre Klinik Mutu. Sterilisasi sangat penting untuk keamanan dan mutu produk perikanan di pasar global.

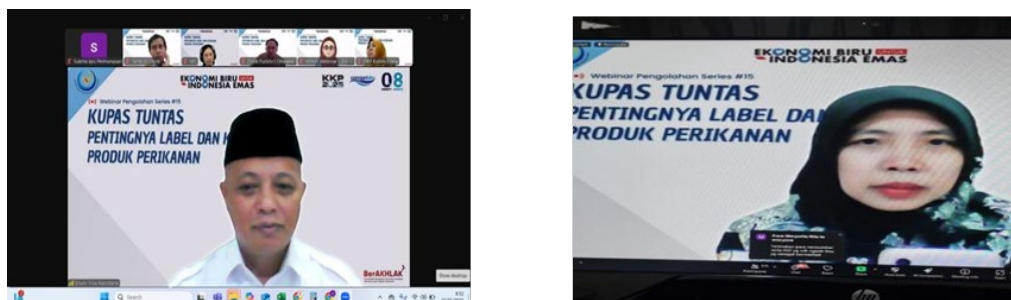


Gambar 13. Webinar Sterilisasi Produk Perikanan: Strategi UMKM Menembus Pasar Global

9. Webinar Kupas Tuntas Pentingnya Label dan Kemasan produk Perikanan

Kegiatan webinar dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan Youtube Ditjen PDSPPK. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota, Pembina Mutu, Penyuluh Perikanan, pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya UPI skala mikro dan kecil, akademisi, dan masyarakat umum sebanyak 1.130 peserta. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pemahaman persyaratan label sesuai regulasi yang berlaku, memberikan pemahaman tentang peran kemasan dan label dalam pemasaran dan kepatuhan regulasi, memberikan pemahaman tentang teknologi pengemasan dan pelabelan yang tepat untuk produk perikanan, mengupas tren terkini dalam desain kemasan berkelanjutan, memberikan inspirasi inovasi kemasan untuk usaha mikro kecil. Narasumber webinar ini adalah Dr. Didik Joko Pursito dan Prof. Dr. Nugraha Edhi Suyatma. Dr. Didik membahas pengawasan label dan kemasan pada produk perikanan. Label pangan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk larangan mencantumkan keterangan kesehatan yang menyesatkan. Penghapusan atau penggantian label dan tanggal kadaluwarsa juga dilarang. Kemasan pangan berfungsi sebagai wadah yang melindungi dan menyediakan informasi. Prof. Nugraha menjelaskan tentang teknologi pengemasan dan pelabelan. Kemasan yang baik meningkatkan nilai jual produk dan harus dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti karakteristik produk dan segmen pasar. Peserta mengajukan

pertanyaan tentang pencantuman izin edar, jenis kemasan, dan informasi nilai gizi. Kesimpulannya, diperlukan kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan regulasi yang baik dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Masyarakat juga diimbau untuk menjadi konsumen cerdas dengan membaca label dan melaporkan produk mencurigakan.

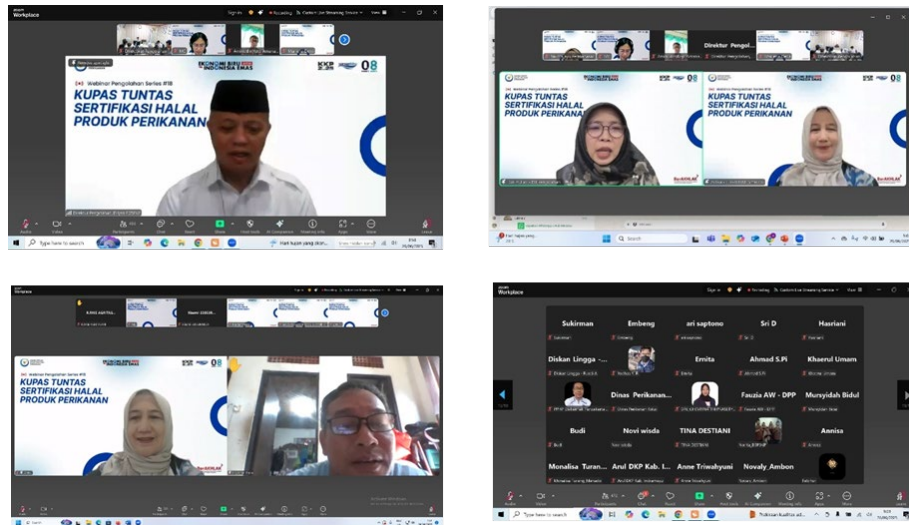


Gambar 14. Webinar Kupas Tuntas Pentingnya Label dan Kemasan produk Perikanan

10. Webinar Kupas Tuntas Sertifikasi Halal Produk Perikanan

Kegiatan webinar dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan Youtube Ditjen PDSPKP. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota, Pembina Mutu, Penyuluh Perikanan, pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya UPI skala mikro dan kecil, akademisi, dan masyarakat umum sebanyak 721 peserta. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah Meningkatkan pemahaman pelaku usaha, mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam rangka menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi Masyarakat, memberikan informasi menyeluruh mengenai prosedur, persyaratan, dan tahapan sertifikasi halal sesuai dengan regulasi yang berlaku, mendorong pelaku usaha untuk segera mendaftarkan produk mereka guna mendapatkan sertifikasi halal, khususnya menjelang batas waktu kewajiban sertifikasi halal. Narasumber pada webinar adalah Astika Kasiro dari SMESCO Indonesia, membahas tentang sertifikasi halal. Pelaku usaha harus memastikan bahwa semua bahan baku dan proses produksi bebas dari unsur haram, memiliki dokumen legal, dan menyusun Sistem Jaminan Produk Halal. Proses sertifikasi dimulai dengan pendaftaran di sistem SIHALAL BPJPH dan pengajuan permohonan. Pelaku usaha harus menunjuk penyelia halal yang terlatih. Terdapat juga informasi tentang kuota Sertifikat Halal Gratis. Pertanyaan peserta mencakup sertifikat self-declare, pendaftaran perubahan data, biaya pendaftaran,

dan kontak penyelia halal. Kesimpulan menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha.



Gambar 15. Webinar Kupas Tuntas Sertifikasi Halal Produk Perikanan

IK 2. Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI

Presentase rancangan SNI produk perikanan yang memenuhi tahapan perumusan SNI adalah capaian perumusan SNI dibandingkan dengan keseluruhan tahapan perumusan SNI pada tahun berjalan. Tahapan perumusan Rancangan SNI produk perikanan meliputi RSN11, RSN12, RSN13, penyampaian RSN1 ke BSN. Perumusan rancangan SNI dilakukan oleh Komite teknis yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Perubahan dalam perdagangan internasional telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global. Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, dengan tujuan : 1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; 2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat; 3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.

Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSN11), Rapat Teknis (Perumusan RSN12) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSN13), kemudian tahap jajak pendapat (e-balloting) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di website SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	s.d. TW II 2025			TW II 2025	TW I 2025
Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI	50	25	-	100	50	25	-	25	100	50	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan II 2025 capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI adalah sebesar 50%. Capaian tersebut setara dengan 100,00% terhadap target Triwulan II 2025 yakni 50% atau setara dengan 200,00% jika dibandingkan dengan target Triwulan I 2025 yakni 25%. IK tersebut adalah bersifat Triwulanan. IK tersebut pada periode yang sama di tahun 2024 bernama Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan dengan satuan produk. Terdapat perbedaan satuan antara Triwulan II 2025 dengan periode yang sama di tahun 2024, sehingga capaian tersebut tidak dapat dibandingkan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI sebesar Rp 102.655.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp 37.694.700,- atau sebesar 36,72% dari pagu anggaran.

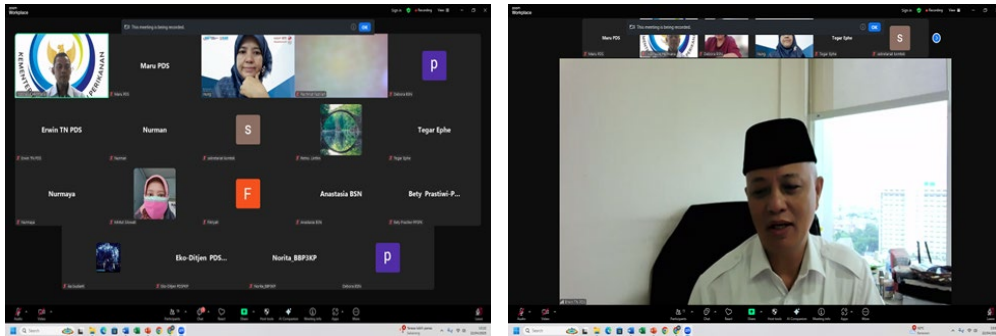
Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pada kegiatan Triwulan II 2025 adalah terdapat kendala dalam penulisan metode uji dalam RSNI jika metode yang diacu lebih dari satu. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II adalah rapat konsensus RSNI telah dilaksanakan sesuai

target waktu. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya adalah dalam penyusunan RSNI tahun depan dapat dipertimbangkan untuk melakukan perbandingan hasil uji dengan menggunakan metode yang akan digunakan dalam SNI.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Rapat Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan

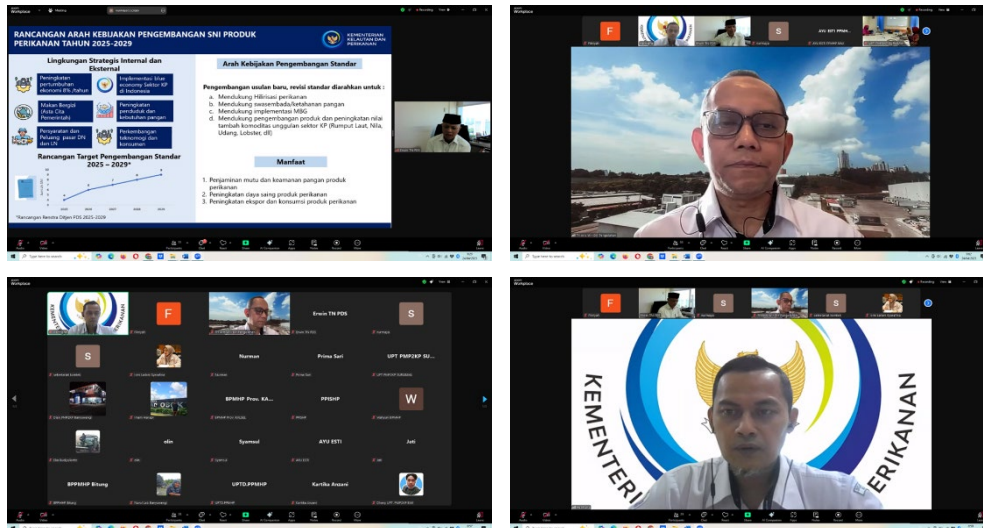
Rapat dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025, di ruang rapat Sekretariat Lt. 14 GMB 3. Rapat dihadiri perwakilan Setditjen PDSPKP, Direktorat Pemasaran, Direktorat Logistik, Direktorat Pemberdayaan Usaha, BBP3KP, Direktur BSN, perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan serta pelaksana Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan koordinasi terkait Penerapan Standar Nasional Indonesia dalam upaya mengakselerasi penerapan SNI. Direktorat Pengolahan mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan dan penerapan standar, terkait tugas tersebut Direktorat Pengolahan mendorong penerapan SNI melalui pembinaan, pendampingan dan fasilitasi penerapan SNI. Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar melaporkan bahwa dari 109 SNI produk perikanan, hanya 21 atau 19% yang diterapkan. Dari 107 SNI, hanya 19 yang diterapkan, dan dua SNI wajib telah 100% diterapkan. Dari 77.808 pelaku usaha pengolahan ikan, hanya 144 atau 0,21% yang menerapkan SNI. Untuk pelaku usaha mikro kecil, hanya 97 dari 76.328 yang menerapkan SNI, sedangkan untuk menengah besar, 47 dari 1.480 menerapkan SNI. Direktur Penguatan Penerapan Standar menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan sejak 2017 antara KKP, BSN, dan UNIDO untuk meningkatkan produk. Pelaku usaha perlu pemenuhan jaminan mutu dan akses pasar. Diskusi mencakup pentingnya penerapan SNI untuk daya saing dan hilirisasi, keluhan terkait kualitas bahan baku, dan kebutuhan untuk sosialisasi serta biaya pengujian. Direktorat Pengolahan akan meningkatkan kerjasama untuk sertifikasi SNI bagi pelaku usaha mikro dan kecil.



Gambar 16. Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan

2. Rapat Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan

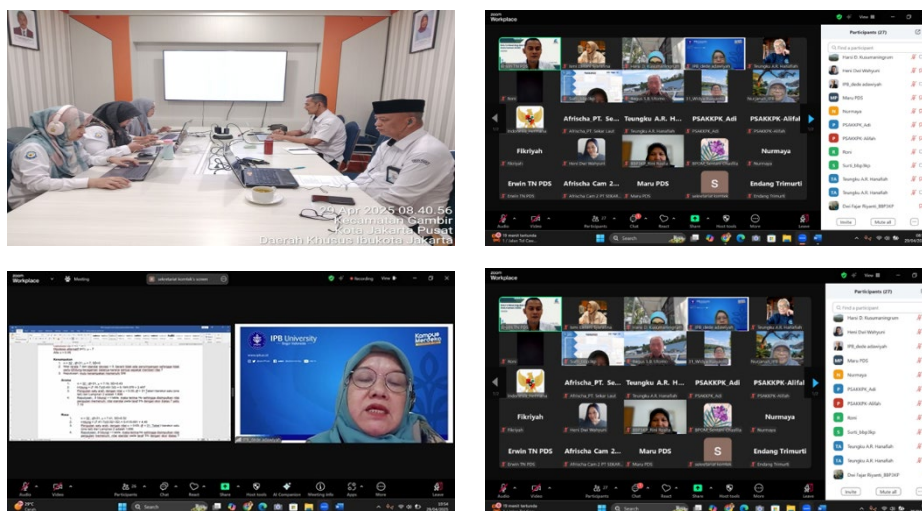
Rapat dilaksanakan tanggal 24 April 2025 melalui *zoom meeting*. Rapat dihadiri oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro), perwakilan Pusat Mutu Pasca Panen-BBMHKP, perwakilan Unit Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP dan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan koordinasi dengan LSPro dalam rangka Penerapan Standar Nasional Indonesia khususnya terkait sertifikasi SNI wajib. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas masukan dari pelaku penerapan SNI Wajib terkait, Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI agar tidak perlu dicantumkan ukuran dari produk yang disertifikasi dan penambahan varian ukuran (berat bersih). Pertimbangan dari Direktorat Pengolahan mencakup beberapa poin penting. Sertifikasi SNI adalah untuk produk, dan tanda SNI harus dapat dipertanggungjawabkan. Ukuran berat bersih dicantumkan untuk mengklarifikasi produk yang disertifikasi. Pada produk tuna, sarden, atau makarel dalam kemasan kaleng, ukuran berbeda dapat menghasilkan nilai F0 dan karakteristik sensori yang berbeda. Nilai F0 harus dibuktikan dengan laporan pengukuran. Semua varian harus memenuhi persyaratan mutu SNI melalui pengujian. Tanggapan dari peserta rapat menyetujui pentingnya pencantuman varian ukuran, dan jika ada penambahan varian, perlu dilakukan pengujian F0. Selanjutnya akan meminta arahan dan koordinasi dengan bagian hukum terkait prosedur perubahan sertifikat.



Gambar 17. Koordinasi Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan

3. Rapat Teknis Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 2025

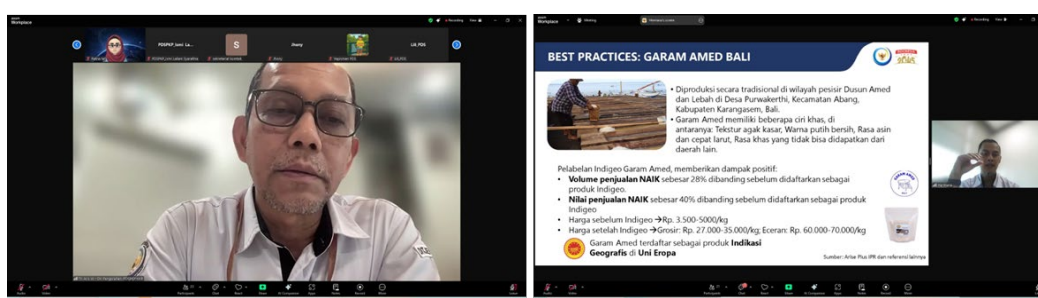
Rapat dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 29-30 April 2025. Rapat dihadiri sebanyak 26 orang, terdiri dari 10 anggota Komtek 65-05, Konseptor sebanyak 8 orang, Tim Sekretariat Komtek 65-05 sekaligus editor RSNI produk perikanan sebanyak 8 orang dan perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian – BSN, serta Tim Ahli dari GQSP UNIDO. Rapat teknis adalah untuk membahas substansi 4 RSNI Produk Perikanan yaitu, RSNI Pedoman pengujian organoleptik atau sensori pada produk perikanan, RSNI Kerupuk ikan, krustasea, dan moluska siap makan, RSNI Pempek, dan RSNI Agar-agar kertas. Pada rapat teknis 65-05, membahas konsep RSNI2 berdasarkan data dan literatur. Rapat berlangsung selama 2 hari dengan 2 sesi per hari, di mana setiap sesi berlangsung sekitar 2-3 jam untuk presentasi dan diskusi. Terdapat beberapa masukan dari Anggota Komite Teknis, seperti mengganti frasa pada RSNI, pemutakhiran persyaratan kualitas produk, penyesuaian regulasi, dan perbaikan alur proses. Tindak lanjut termasuk penyelesaian RSNI TA 2025 hingga Mei 2025 dan konsensus RSNI pada Juni 2025.



Gambar 18. Rapat Teknis Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 2025

4. Rapat Identifikasi Potensi Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

Rapat dilaksanakan secara daring pada tanggal 6 Juni 2025. Dihadiri oleh perwakilan Setditjen PDSPKP, Timja Lingkup Dit. Pengolahan, DKP Prov. Maluku Utara, dan DKP Kab. Jayawijaya. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengidentifikasi potensi Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan dan menyampaikan informasi tentang indikasi geografis. Potensi produk indikasi geografis meliputi cacing laut dan cakalang asap dari Maluku Utara serta garam Wamena dari Jayawijaya. Pemerintah daerah diajak untuk mendaftar produk unik. KKP akan mengirim surat ke DKP Daerah untuk proses pendaftaran.



Gambar 19. Rapat Identifikasi Potensi Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

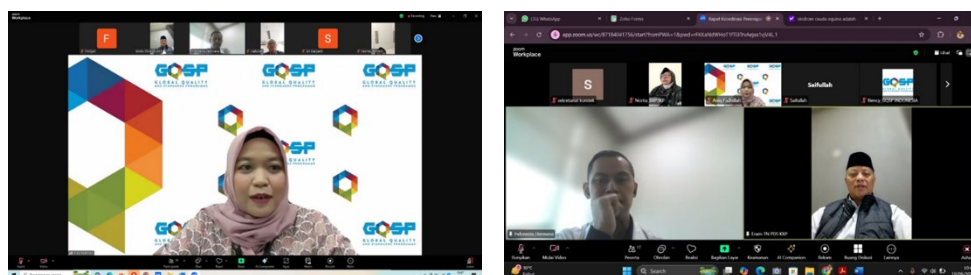
5. Rapat Koordinasi Pemantauan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan

Rapat dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom pada tanggal 10 Juni 2025. Dihadiri perwakilan National Chief Technical Advisor (NCTA) GQSP Indonesia, BBP3KP, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP)

Semarang, Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan, serta Anggota Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memperoleh informasi progres sertifikasi SNI produk Bandeng UMK dari LSPro Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Semarang serta langkah tindak lanjut penyelesaiannya. Dalam rangka penerapan SNI produk perikanan, Direktorat Pengolahan bekerjasama dengan GQSP Indonesia untuk sertifikasi UKM. Pada tahun 2024, ada 5 UKM yang difasilitasi sertifikasinya, antara lain:

- UMK Qina Bandeng mengalami kendala izin edar, batas waktu hingga Oktober 2025.
- Duri Lunak Kharisma masih dalam proses pendaftaran merek dan banding, batas waktu hingga Oktober 2025.
- Lima Bintang sudah sertifikasi, tetapi hasil uji ALT tidak memenuhi syarat, batas waktu hingga Oktober 2025.
- CV. New Citra mengalami kendala hasil uji air dan menunggu hasil uji ulang.
- UD. Putri Laut sudah selesai sertifikasi dan menunggu penerbitan sertifikat.

LSPro BPMHP Semarang akan memantau semua proses perbaikan dan tindak lanjut.

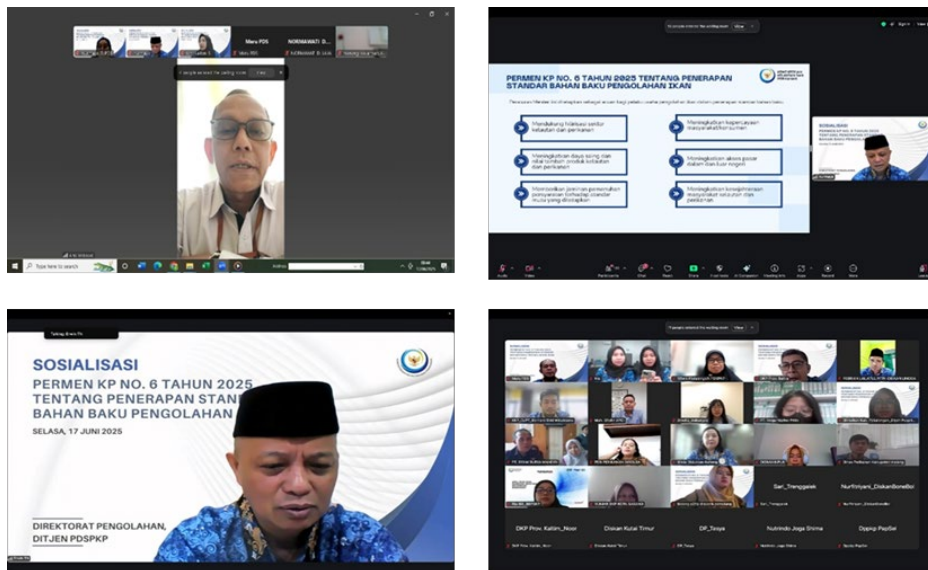


Gambar 20. Rapat Koordinasi Pemantauan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan

6. Sosialisasi Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan

Kegiatan dilakukan secara daring melalui *zoom meeting* pada tanggal 17 Juni 2025. Kegiatan dihadiri oleh 100 orang peserta zoom dan 196 orang peserta *live streaming* youtube yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan

Pemasaran Produk Perikanan (AP5I), Asosiasi Pengusaha Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI), Asosiasi Pengusaha Bandeng Indonesia (ASPUBI), Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Setditjen Perikanan Budidaya, Setditjen Perikanan Tangkap, Setditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Setditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemasaran Ditjen PDSPKP, Direktorat Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP, Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP, serta pelaksana Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyebarluaskan informasi kepada para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan atas ditetapkannya Permen KP Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan. Sosialisasi dibuka oleh Direktur Pengolahan yang menjelaskan peran Ditjen PDSPKP dalam memastikan produk kelautan dan perikanan memenuhi jaminan mutu dan keamanan. Pelaku usaha diharapkan berkomitmen menggunakan bahan baku yang sesuai dengan standar yang diatur dalam Pasal 85 dan 87 PP 27 Tahun 2021. Materi yang disampaikan Ketua Timja Pengembangan dan Penerapan Standar mencakup dasar hukum, manfaat, dan cakupan dari Permen KP Nomor 6 Tahun 2025. Dalam diskusi, disampaikan bahwa meskipun peraturan ditetapkan pada 28 Februari 2025, banyak poin sudah diatur dalam regulasi lain. Untuk membuktikan penerapan standar bahan baku, pelaku usaha perlu memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI). Beberapa tantangan dalam penerapan standar termasuk kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta fasilitas pelabuhan yang belum memenuhi standar. Pelaku usaha perlu mengikuti Peraturan Menteri mengenai standar bahan baku dalam proses produksi. Tindak lanjut akan dilakukan dengan sosialisasi oleh Direktorat Pengolahan dan Dinas Kelautan dan Perikanan di setiap daerah, serta sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

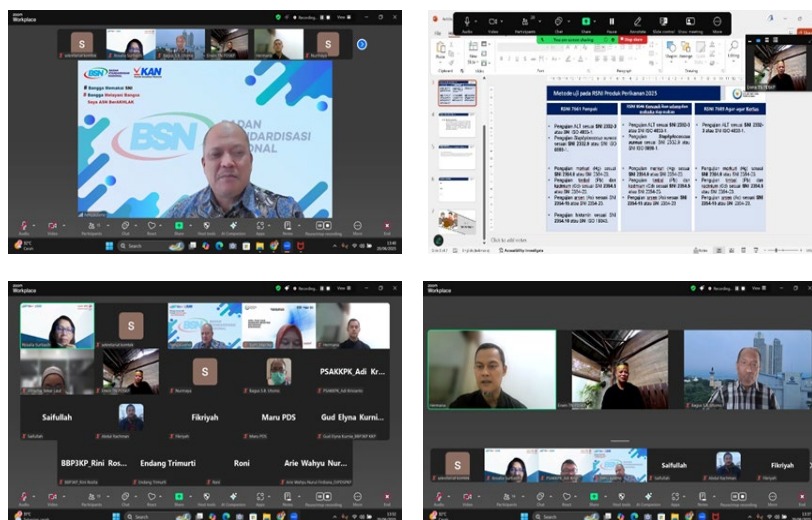


Gambar 21. Sosialisasi Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan

7. Rapat Persiapan Konsensus RSNI3 Produk Perikanan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025, secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Rapat dihadiri oleh Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian, BSN, perwakilan anggota komtek 65:05 produk perikanan, perwakilan tim konseptor RSNI 65-05 Produk Perikanan, dan Pelaksana pada Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk membahas penulisan Metode Uji pada SNI. Pada rapat teknis pada tanggal 29-30 April 2025, dibahas penulisan SNI untuk produk perikanan yang memiliki lebih dari satu metode uji. Sesuai pedoman SNI no 4 Tahun 2023, satu metode acuan harus ditetapkan untuk mengatasi keraguan dalam pengujian. Beberapa pengujian dengan dua metode uji di RSNI produk perikanan 2025 termasuk pempek, kerupuk ikan, dan agar-agar. Beberapa pengujian yang disebutkan adalah pengujian *Staphylococcus aureus*, merkuri, timbal, kadmium, arsen, dan histamin. BSN menyatakan bahwa metode uji alternatif diperbolehkan, namun salah satu harus ditetapkan sebagai acuan, berdasarkan data perbandingan dan kesesuaian dengan standar internasional. Contoh penulisan metode uji yang disepakati adalah pengujian residu pestisida dengan dua metode: EN 15662 atau AOAC 2007. 01. Rapat juga memutuskan bahwa SNI produk dengan beberapa metode akan tetap dituliskan. Usulan untuk menggunakan SNI metode uji khusus sebagai acuan akan dibahas dalam rapat

konsensus. Penyusunan RSNi tahun depan akan mempertimbangkan perbandingan hasil uji dengan metode yang akan digunakan. Tindak lanjutnya, komite teknis akan membahas metode yang dipilih sebagai acuan pada rapat konsensus 24-25 Juni 2025.



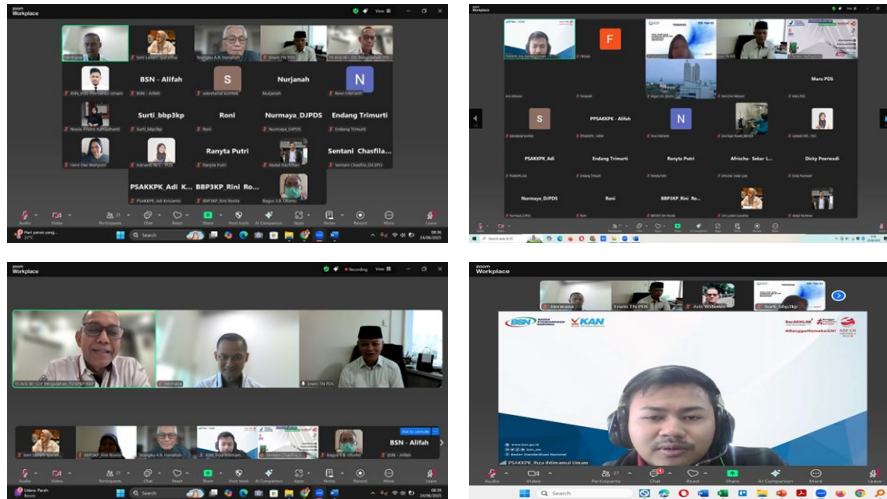
Gambar 22. Rapat Persiapan Konsensus RSNi3 Produk Perikanan

8. Rapat Konsensus RSNI Produk Perikanan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juni 2025, secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Rapat dihadiri oleh 26 orang terdiri dari 10 anggota Komtek 65-05, sebanyak 8 orang Konseptor dan sebanyak 8 orang sekretariat komtek 65-05 sekaligus editor RSNi produk perikanan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian – BSN. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas dokumen RSNi2 yang telah disusun dan dibahas pada rapat teknis untuk disepakati/konsensus menjadi RSNi3. RSNi Produk Perikanan yang dibahas adalah:

- Pedoman pengujian sensori pada hasil perikanan
- Kerupuk ikan, krustasea, dan moluska siap makan
- Pempek; dan
- Agar-agar kertas

Komite Teknis telah menyetujui usulan RSNi2 menjadi RSNi3 dengan beberapa catatan untuk diperbaiki oleh Tim Konseptor. Hal-hal yang dibahas termasuk perbaikan penulisan, penggunaan gambar teknik, penambahan peraturan baru, dan perubahan peraturan pemerintah. Tindak lanjut meliputi perbaikan redaksional dalam 14 hari kerja dan pengiriman dokumen ke BSN.



Gambar 23. Rapat Konsensus RSNi Produk Perikanan

IK 3. Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP

Pembinaan Unit Pengolahan Produk KP menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP dilakukan melalui sosialisasi, bimtek, dan atau pembinaan lapangan yang dibuktikan dengan rekomendasi dan/atau manual HACCP dan/atau laporan pembinaan.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW I 2025	TW II 2024	s.d. TW II 2025			TW II 2025	TW II 2024
Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP	10	3	-	100	14,83	8	-	14,83	148	14,83	-	-

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Kinerja (IK) Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP pada Triwulan II 2025 adalah sebesar 14,83% atau setara 148,00% dengan target Triwulan II 2025 yakni 10%, dan setara dengan 14,83% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni 100%, jika dibandingkan dengan target Triwulan I 2025 maka setara dengan 494,33%. IK tersebut adalah bersifat triwulanan. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP sebesar Rp 96.083.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp 71.520.394,- atau sebesar 74,44% dari pagu anggaran.

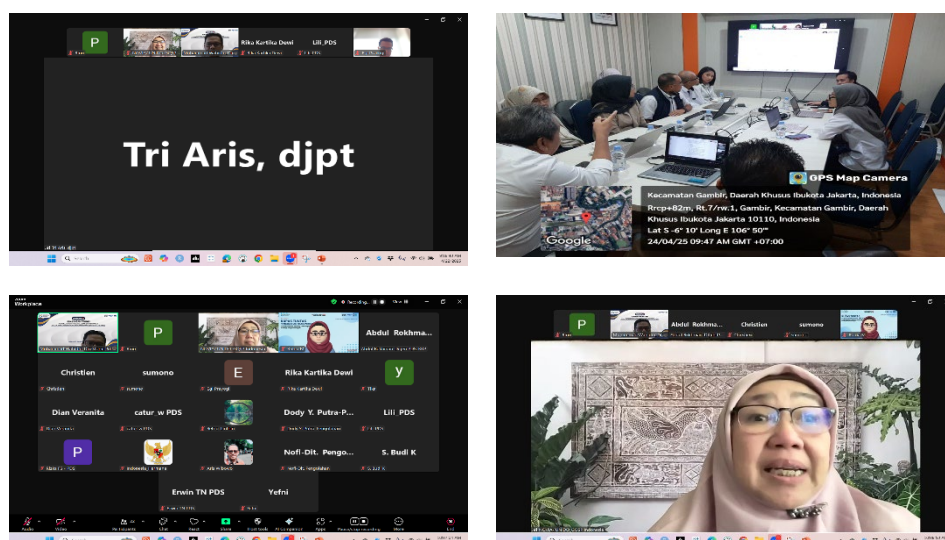
Pada Triwulan II 2025 tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II, adalah hasil dari diskusi dengan para peserta rapat yang terdiri dari seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia diketahui kendala yang dihadapi PM dalam pembinaan di daerah dan rata-rata masih terbatas kompetensinya dalam pembinaan HACCP. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya, yaitu menghimbau kepada dinas untuk segera mengajukan pengusulan data PM melalui surat resmi sehingga dapat segera dipetakan. Hasil pemetaan akan digunakan untuk menentukan metode pelatihan HACCP yang diberikan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Penyusunan Kriteria Pembina Mutu HACCP

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025, secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Tenaga Ahli GQSP UNIDO, perwakilan Sesditjen PDSPKP, Pusat Mutu Pascapanen, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama dan perwakilan Timja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah koordinasi kriteria penetapan Pembina Mutu HACCP sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pembinaan HACCP.

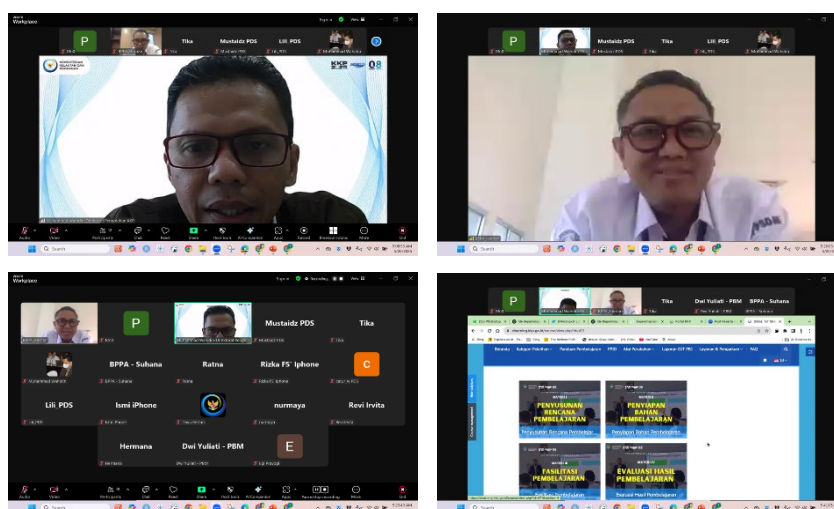
Direktur Pengolahan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan HACCP untuk memfasilitasi ekspor. Saat ini, terdapat 1.065 Pengawasan Makanan (PM) terdaftar di seluruh Indonesia yang memerlukan informasi tentang teknis pembinaan HACCP. Pusat Mutu Pascapanen-BPPMHKP memberikan pelatihan HACCP melalui Bimtek, sosialisasi, dan verifikasi langsung, namun pada tahun 2024, pelatihan hanya akan dilakukan di beberapa wilayah karena keterbatasan dana. Peserta pelatihan yang lulus akan mendapat pelatihan lanjutan untuk menjadi inspektur mutu bersertifikat. Materi pelatihan mencakup program dasar HACCP, keamanan pangan, teknik etika inspektur mutu, dan tata cara audit. Praktik lapangan juga dilakukan, dan peserta yang lulus akan menerima sertifikat kelulusan. Ditjen PDSPKP siap mendukung penyiapan PM HACCP untuk mempermudah proses sertifikasi. Meskipun PM perlu mengikuti program pelatihan pengenalan HACCP, perlu ada kerjasama dengan BPSPDM untuk memberikan sertifikasi kompetensi. PM harus memiliki kemampuan dasar penerapan kelayakan pengolahan sebelum melakukan pembinaan HACCP. Mereka harus mampu melakukan verifikasi dan validasi serta pendampingan bagi UMKM. Koordinasi antara instruktur mutu dan PM sangat penting. Langkah-langkah tindak lanjut termasuk pendataan ulang PM terdaftar, pertemuan berkala dengan Badan Mutu, pelatihan lanjutan, dan pendetailan modul materi pelatihan sudah direncanakan. Peningkatan kapasitas SDM dalam HACCP menjadi fokus untuk mendukung ekspor.



Gambar 24. Penyusunan Kriteria Pembina Mutu HACCP

2. Koordinasi Sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025, secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Balai Diklat Aparatur Sukamandi-BPPSDMKP, perwakilan SDMAO, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi-Sesditjen PDSPKP serta perwakilan Timja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mendapatkan masukan terkait SOP untuk mendapatkan sertifikasi pelatihan dari BPPSDMKP bagi peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP. Pelatihan HACCP bagi pembina mutu Direktorat Pengolahan akan dilaksanakan setelah rapat koordinasi mengenai materi, teknis, dan sertifikat pelatihan. Perwakilan dari SDMAO-Sesditjen PDSPKP menghargai rencana pelatihan ini yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai. Peserta pelatihan non klasik seperti bimtek dan workshop dapat memperoleh sertifikat dari BPPSDMKP jika narasumbernya adalah fasilitator yang sudah mengikuti pelatihan TOT metodologi mengajar dari BDA. Kurikulum TOT mencakup penyusunan pembelajaran dan praktik mengajar, dan disarankan dilakukan secara offline jika hanya tiga hari. Pegawai yang sudah mengikuti TOT bisa melakukannya lagi. Untuk pelatihan dengan fasilitator bersertifikat, perlu ada surat kepada Kapus Pelatihan. Sertifikat pelatihan akan dikeluarkan setelah divalidasi oleh BDA. Rekomendasi untuk ke depan adalah mengajukan permohonan sertifikat untuk peserta pelatihan HACCP.



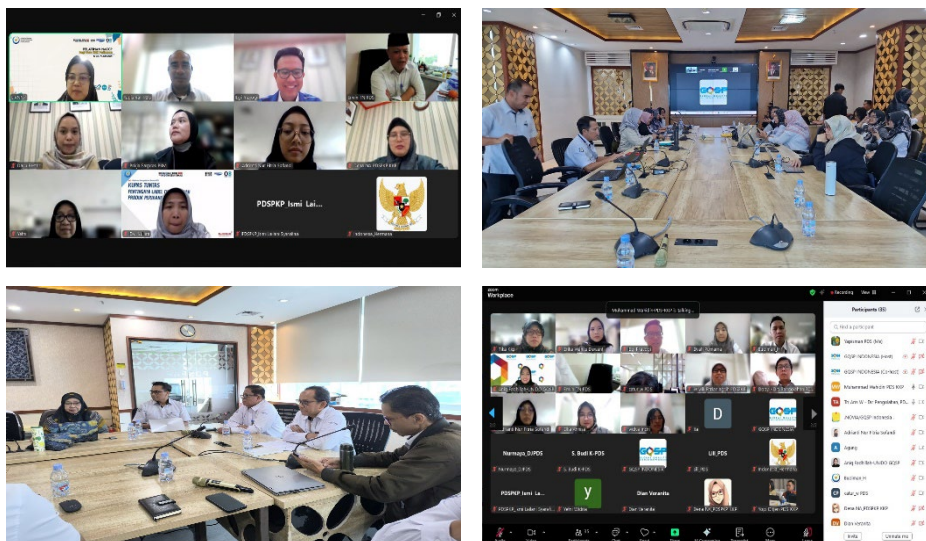
Gambar 25. Koordinasi Sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

3. Training Pembina Mutu *Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)*

Pelaksanaan Training dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 11-12 Juni 2025 di R.R. Branding, GMB 3, KKP dan secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan kompetensi pengetahuan Pembina Mutu dalam hal pembinaan HACCP pada UPI. Pelatihan berlangsung pada tanggal 11 dan 12 Juni 2025, dihadiri oleh 36 peserta dan perwakilan dari UNIDO serta GQSP Indonesia. Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan dan ditujukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi standar pasar agar siap untuk sertifikasi. Pada pembukaan, Kepala Mutu Pascapanen menyampaikan pentingnya pembinaan HACCP yang sesuai dengan inspeksi Badan Mutu, dan kerjasama yang baik antara pembina mutu pusat dan daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekspor. Direktur Pengolahan menekankan bahwa pelatihan merupakan langkah awal mengikuti struktur organisasi baru dan mendukung program ekonomi biru. Materi pelatihan disampaikan oleh UNIDO dan GQSP Indonesia, yang membahas penerapan HACCP. Mereka menjelaskan bahwa penerapan HACCP hanya dapat dilakukan setelah program prasyarat dijalankan. Terdapat dua bab dalam CXC yaitu GHP dan HACCP, dengan lima tahap awal dalam penerapan HACCP dan tujuh prinsip HACCP yang harus diikuti. Pembina mutu tidak menentukan *critical control points*, tetapi bertugas menjembatani informasi. Dalam sesi tanya jawab, narasumber dari BPPMHKP menjelaskan bahwa hasil perikanan harus memenuhi mutu dan keamanan pangan untuk mendukung kegiatan ekspor. Sertifikat HACCP adalah bukti pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan. Proses sertifikasi mencakup permohonan baru, perpanjangan, dan peninjauan ulang.

Hari kedua pelatihan dimulai dengan pemaparan dokumen manual HACCP oleh sepuluh tim peserta. Semua dokumen direviu oleh narasumber dari BPPMHKP dan UNIDO. Terdapat catatan penting dalam penentuan bahaya dan perlu dibuat kebijakan terkait pengendalian bahaya allergen serta prosedur pengendalian CCP. Peserta diharapkan menjadi ahli dalam komoditas tertentu dan memahami penerapan HACCP pada komoditas lain. Pelatihan diakhiri dengan pengarahan dari Kepala Tim SKP untuk memperbaiki dokumen manual yang telah disarankan. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan, dan ke depan akan

ada pelatihan audit internal pembina mutu HACCP untuk terus meningkatkan pemahaman peserta.

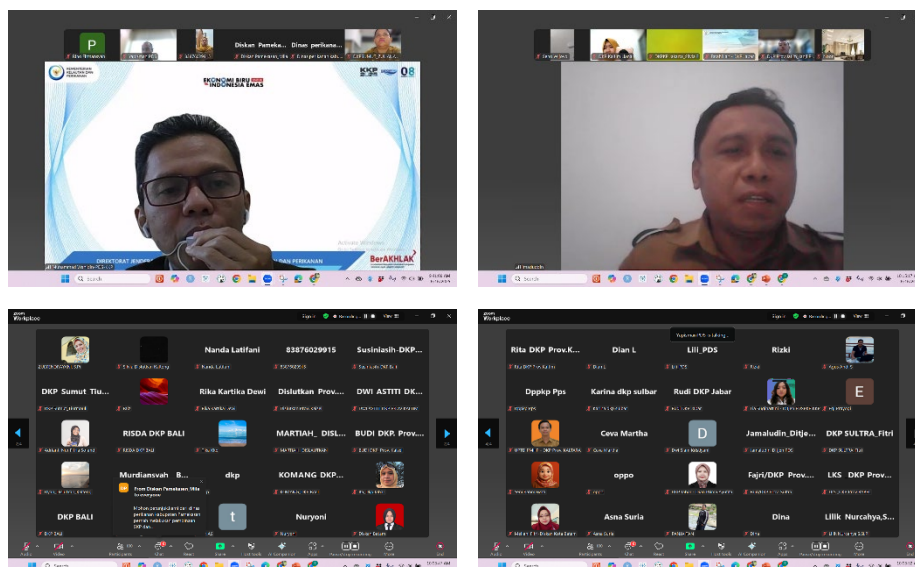


Gambar 26. Training Pembina Mutu *Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)*

4. Rapat Koordinasi Program Pembinaan HACCP

Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Rapat dihadiri oleh perwakilan Seditjen PDSPKP, perwakilan seluruh Direktorat lingkup Ditjen PDSPKP dan seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Tujuan pelaksanaan kegiatan melakukan koordinasi dengan Dinas KP Daerah terkait program pembinaan usaha dalam rangka penerbitan sertifikat HACCP, serta masukan mengenai kendala pembinaan yang terjadi di daerah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 membagikan kewenangan pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Ditjen Teknis bertanggung jawab atas pembinaan, sedangkan BPPMHKP melakukan kontrol dan pengawasan. Dalam Permen KP No 16 tahun 2024, pembinaan penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan oleh Ditjen PDSPKP. Pada 15 Juni 2025, tercatat 3.942 UPI bersertifikasi SKP dan 1.194 UPI bersertifikasi HACCP. Pembina Mutu Daerah perlu memahami lebih dalam tentang pembinaan HACCP. Ditjen PDSPKP telah meminta data pembina mutu pusat dan daerah untuk pemetaan kompetensi PM dalam pembinaan HACCP. Diskusi menunjukkan banyak peserta dari daerah kekurangan PM yang kompeten untuk pembinaan HACCP, sehingga perlu pelatihan. Dinas diharapkan segera mengajukan data PM secara resmi untuk

pemetaan dan menentukan metode pelatihan yang tepat. Tidak ada kendala dalam kegiatan pada Triwulan II, tetapi kompetensi PM dalam pembinaan HACCP masih terbatas. Rekomendasi dibuat untuk pengusulan data PM agar dapat segera dipetakan.



Gambar 27. Rapat Koordinasi Program Pembinaan HACCP

Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

IK 4. Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

Produksi Olahan KP adalah volume produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan skala mikro, kecil (MK) dan skala menengah besar (MB).

Penghitungan VPO skala Menengah Besar dilakukan melalui penarikan data volume dan jenis produk UPI Skala Menengah Besar (UPIMB) yang tercatat dalam data BP2MHKP dan Badan Karantina Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi data ekspor dan domestik keluar. Data lalu lintas ikan digunakan sebagai pendekatan dalam penghitungan VPO UPI MB, karena menyediakan data volume dan jenis produk olahan yang diproduksi oleh UPI MB.

Pengumpulan data volume produk olahan unit pengolahan ikan dan utilitas tahun 2024 dilaksanakan di 38 Provinsi di Indonesia. Pendataan dilakukan terhadap 13 (tigabelas) jenis kegiatan UPI meliputi: 1) pendinginan/pengesanikan, 2) pembekuan ikan, 3) penggaraman/pengeringanikan, 4) pemindanganikan, 5) pengasapan/ pemanggangan ikan, 6) peragian/fermentasi ikan, 7) pengalengan ikan,

8) pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi, 9) pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, 10) pembuatan minyak ikan, 11) pengolahan rumput laut, 12) penanganan ikan, dan 13) pengolahan ikan lainnya Data yang disajikan adalah data volume produk olahan dan volume produk setara segar per bulan per kab/kota.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW IV 2024	TW II 2024	s.d. TW II 2025			TW II 2025	TW II 2024
Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	1,67	-	-	3,71	1,95	-	-	1,95	116,77	52,56	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan II 2025 capaian Indikator Kinerja (IK) Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 1,95%. Capaian tersebut setara dengan 116,77% terhadap target Triwulan II 2025 yaitu 1,67% atau setara dengan 52,56% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 3,71%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat semesteran. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 58.503.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp 21.050.900,- atau sebesar 35,98% dari pagu anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II 2025, yaitu:

- Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi UPI yang diperlukan sebagai dasar untuk penetapan populasi, baik dari segi waktu dan kelengkapan datanya
- Terdapat perbedaan format data yang diperoleh dari instansi terkait, sehingga perlu waktu untuk melakukan cleansing data.

Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II adalah adanya koordinasi yang cukup baik antar unit kerja dan K/L. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, yaitu:

- Penetapan kerangka sample untuk penghitungan VPO dan Utilitas UPI MB
- Perlu ditingkatkan koordinasi dengan BPPMHKP dan lintas K/L dalam pelaksanaan kegiatan dan perolehan data.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar dalam rangka Penghitungan VPO Tahun 2025

a. Rapat Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar

Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025, dipimpin oleh Katimja PUP2MB dan dihadiri oleh perwakilan Pusdatin, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Timja Data dan Layanan Publik Sekretariat Ditjen PDSPKP serta perwakilan Timja lingkup Direktorat Pengolahan. Rapat ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai data yang ditapis dari rapat sebelumnya dengan Kementerian Perindustrian dan BPS. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 1.527 UPI MB, meningkat 47 dari tahun sebelumnya. Perwakilan Pusdatin menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan pendataan untuk UPI MB, data berasal dari Ditjen PDSPKP. Saat ini terdapat 433.518 pelaku usaha perikanan, namun masih ada yang belum teridentifikasi. Informasi dari BPS terkait Sensus Ekonomi 2026 akan diinformasikan kemudian. Timja juga menjelaskan bahwa data UPI dipetakan berdasarkan skala usaha. Masing-masing unit kerja diminta melengkapi informasi data yang dibutuhkan.

IK 2. Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI.

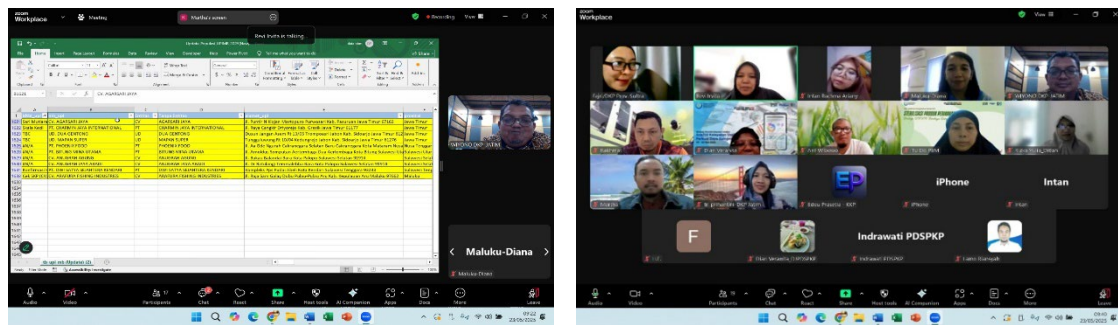


Gambar 28. Rapat Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar

b. Rapat Lanjutan Dalam Rangka Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar

Rapat dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025. Rapat dipimpin oleh Penanggungjawab Output Menengah Besar dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, perwakilan Timja Data dan Layanan Publik Sekretariat Ditjen PDSPKP, dan perwakilan Timja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan dilaksanakannya rapat adalah memperoleh informasi UPI yang belum dapat diidentifikasi apakah masuk dalam kategori UPI skala menengah besar, sehingga jumlah populasi dalam rangka pendataan volume produk olahan dan tingkat utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah besar tahun 2025 dapat ditentukan. Informasi yang diperoleh dari diskusi antara lain:

- CV Arafura Fishing Industries adalah perusahaan skala menengah dengan 32 tenaga kerja dan kapasitas 40 ton.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara tidak memiliki informasi tentang PT. Dwi Satya Sejahtera Kendari, tetapi ditemukan bahwa mereka bermitra dengan PT. Bersatu Untuk Maju.
- PT. Chamin dikategorikan sebagai UPI skala kecil dan CV Agarsari Jaya memproduksi tepung ikan.
- Phonix Food termasuk usaha skala kecil dan memiliki bidang usaha lain di luar perikanan.



Gambar 29. Rapat Lanjutan Dalam Rangka Finalisasi Populasi UPI Menengah Besar

2. Pembahasan Juknis Pendataan Subbab Volume Produk Olahan Skala Menengah Besar

Rapat pembahasan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 secara daring sebagai lanjutan dari rapat Timja Data dan Layanan Publik pada 12 Juni 2025. Masing-masing unit diminta memberikan masukan terhadap draft pedoman pendataan sebelum diserahkan ke Bagian Hukum. Rapat ini dipimpin oleh Katimja PUP2MB dan dihadiri anggota Timja PUP2MB. Pedoman Pendataan Satudata bidang PDSPKP mencakup pendataan Volume Produk Olahan, Gudang Beku dan Stok Ikan, Harga Ikan eceran, dan UPHPN. Pendataan VPO dibagi menjadi skala mikro kecil dan menengah besar. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan sekunder. Responden yang dipilih adalah UPI MB yang memenuhi kriteria tertentu, seperti aktivitas ekspor rutin. Sebagai tindak lanjut, perlu disiapkan pedoman penghitungan volume produk olahan UPI Menengah Besar.



Gambar 30. Pembahasan Juknis Pendataan Subbab Volume Produk Olahan Skala Menengah Besar

3. Diskusi Penyusunan Pedoman Penghitungan Volume Produk Olahan (VPO) dan Utilitas pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah Besar (MB)

Diskusi penyusunan Pedoman Penghitungan VPO UPI MB dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 setelah rapat tentang Juknis pendataan VPO UPI MB pada 13 Juni 2024. Diskusi ini dipimpin oleh Katimja PUP2MB dan dihadiri oleh anggota Timja PUP2MB. Tujuan penyusunan pedoman adalah untuk memandu petugas data dan tim analisa data dalam penghitungan produktivitas unit pengolahan ikan skala menengah besar. Dasar hukum pelaksanaan Penghitungan Utilitas dan Volume Produk Olahan mencakup beberapa peraturan pemerintah serta keputusan menteri terkait pengolahan ikan. Penghitungan ini dilakukan setiap tahun di seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki UPI MB melalui pendataan utilitas dan volume produk olahan. Data diperoleh dari badan terkait dan petugas data di unit pengolahan menggunakan kuesioner tertentu. VPO UPI MB adalah total volume produk dari setiap UPI dalam satu tahun. Metode pengolahan data utilitas mencakup penghitungan kapasitas terpasang, volume produksi, utilitas setiap UPI, dan rata-rata utilitas dari aktivitas pengolahan. Rumus tertentu digunakan dalam penghitungan utilitas.



Gambar 31. Diskusi Penyusunan Pedoman Penghitungan Volume Produk Olahan (VPO) dan Utilitas pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah Besar (MB)

4. Penetapan Populasi VPO dan Cleansing Data

Rapat tentang penetapan populasi VPO UPI MB dan pembersihan data dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, dipimpin oleh Katimja PUP2MB. Rapat ini melibatkan perwakilan dari Bagian Data dan Layanan Publik Ditjen PDSPKP serta Timja dari Direktorat Pengolahan. Tujuan rapat adalah untuk menentukan kerangka sampel untuk penghitungan VPO UPI MB dan menetapkan populasi UPI MB Tahun 2025 sebanyak 1.520 UPI. Cleansing data dilakukan pada 30.000 data lalu lintas

domestik untuk mengklasifikasikan komoditas ke dalam 13 jenis kegiatan pengolahan ikan. Sekitar 2.000 data tidak dapat diidentifikasi karena kurang dukungan informasi. Dalam rapat ini, beberapa kesepakatan dicapai, termasuk cara mengelompokkan jenis olahan berdasarkan moda transportasi dan jenis produk. Kesimpulan rapat menyatakan bahwa populasi UPI MB adalah 1.520 UPI dan pembersihan data lanjutan diperlukan.



Gambar 32. Penetapan Populasi VPO dan Cleansing Data

5. Validasi Nasional Data PDSPKP Semester II 2024

Pelaksanaan Validasi Nasional Data PDSPKP Semester II 2024 dilaksanakan pada tanggal 15-17 April 2025 di R.R Branding GMB III Lt.15 Gambir Jakarta Pusat. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Validator Pusat, Validator Provinsi, Validator Kab/kota, Enumerator, Dit. Logistik, Dit. Pengolahan, Dit.Pemasaran, dan Dit. Pemberdayaan Usaha dan BBP3KP, serta pelaksana lingkup Tim Kerja Data dan Layanan Publik. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan peserta offline dari Validator Pusat dan Pusdatin. Peserta online terdiri dari validator provinsi dan validator kab/kota. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Verifikasi dan validasi data statistik kelautan dan perikanan bidang PDSPKP tahun 2024. Narasumber Pak Nandi Sukri dari Universitas Padjajaran menjelaskan tata cara pengolahan data volume produk olahan untuk skala mikro dan kecil. Rekomendasi termasuk memisahkan sampel berdasarkan skala dan melengkapi database UPI sesuai omset atau kapasitas. Pada Tahun 2024, Semester 1 tercatat 446 Lembar Kerja (LK), dengan 401 LK valid, dan pada Semester 2 turun menjadi 423 LK. Provinsi dengan jumlah LK valid tertinggi di Semester 1 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, namun terjadi penurunan di Jawa Timur dan Jawa Barat pada

Semester 2. Konsistensi dan kualitas data menjadi tantangan utama. Kegiatan validasi nasional direncanakan di akhir April atau awal Mei 2025.

6. Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024

Kegiatan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 5-8 Mei 2025 secara luring di R.R. Arwana, Gedung Mina Bahari II Lantai 14 Jakarta dan daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Validator Pusat Unit Data Eselon I (UDE) dan Produsen Data; Validator Sekretariat dan Bidang Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Validator Pelabuhan Perikanan; pejabat/staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pelabuhan Perikanan serta Statistisi, Surveyor Pemetaan, Pranata Komputer dan Pelaksana lingkup Pusdatin. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah verifikasi dan validasi data statistik kelautan dan perikanan tahun 2024. Progres jumlah Lembar Kerja (LK) yang diunggah per 7 Mei 2025 meningkat 3,1% dibandingkan 30 April 2025, dengan LK Valid naik 5%. Validasi data garam pada 2023 mencapai 100%, dan statistik garam final di 69 kabupaten/kota serta 13 provinsi menunjukkan total produksi nasional sebesar 2,04 juta ton. Untuk validasi perikanan tangkap 2024, terdapat 22 provinsi dengan persentase LK valid 100%, 9 provinsi di atas 80%, dan 6 provinsi di bawah 70%. Sedangkan pada perikanan budidaya, 27 provinsi memiliki LK valid di atas 85%, tetapi 11 provinsi masih rendah, di bawah 40%. Pada bidang PDSPKP, 22 provinsi memiliki LK valid 100%, sementara 6 provinsi memiliki progres valid kurang dari 65%. Pelaksanaan validasi nasional satu data tahun 2024 menunjukkan hasil evaluasi berkisar 40-55%. Provinsi yang mencapai validasi 100% di seluruh bidang KP untuk tahun 2024 adalah DI Yogyakarta, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Data hasil validasi dapat diunduh melalui tautan yang disediakan. Input data 2024 ditutup pada 31 Mei 2025, dengan validasi ditutup pada 10 Juni 2025, dan data final akan dipublikasikan pada 15 Oktober 2025. Selain itu, Pusdatin telah mengembangkan aplikasi untuk pendataan tahun 2025 yang terintegrasi. Kegiatan sosialisasi portal KKP akan dilanjutkan untuk memastikan kelancaran pendataan. Sekretariat UDE I dan Pusdatin melakukan koordinasi serta pendampingan untuk memastikan validasi data statistik kelautan dan perikanan berjalan baik.

7. Pembahasan Finalisasi Penghitungan VPO Tahun 2024

Kegiatan pembahasan finalisasi penghitungan VPO Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 13.00 WIB hingga selesai secara luring di Ruang Rapat Lounge, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 13 dan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan dihadiri oleh setditjen PDSPKP, Pusat Data Statistik dan Informasi KKP, Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan, Koordinator Data Direktorat Pengolahan, Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran, dan Anggota Tim Kerja PUP2MK Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah finalisasi penghitungan VPO Tahun 2024 dan koordinasi pendataan Tahun 2025. Perkembangan pendataan 2025 menunjukkan populasi UPI MK sebesar 76.318. Beberapa daerah belum mengirimkan usulan petugas pendataan. Pedoman pendataan untuk PDSPKP 2025 sedang difinalisasi, bersama dengan kerangka sampling, kecuali untuk DKI Jakarta dan D. I. Yogyakarta. Workshop PortalData direncanakan pada minggu kedua Juli 2025 untuk menyelesaikan proses pendataan. Penghitungan VPO 2024 mencapai prognosa 5,014 juta, tetapi perlu pembaruan data. Data pencilan harus dikoreksi, dan koordinasi untuk kerangka sampling harus dilakukan sebelum rapat berikutnya.

IK 5. Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan

Unit Bantuan Pemerintah yang dimanfaatkan oleh penerima bantuan yang diadakan pada tahun berjalan. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan sistem rantai dingin, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta mendukung pencapaian produksi olahan hasil kelautan dan perikanan, khususnya bagi pelaku UMK Pengolahan, pada tahun 2025 Direktorat Pengolahan memfasilitasi pemberian Bantuan Pemerintah berupa *chest freezer* dan peralatan pengolahan. Pemberian bantuan ini sejalan dengan upaya untuk memperkuat kapasitas produksi dan menjaga mutu produk olahan, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha pengolahan di tingkat lokal maupun nasional. Melalui dukungan sarana tersebut, diharapkan para pelaku pengolahan, utamanya UPI pengolahan skala mikro dan kecil dapat lebih optimal dalam menerapkan standar kualitas, memperpanjang masa simpan produk, serta meningkatkan efisiensi proses produksi.

Capaian dari fasilitasi bantuan pemerintah ini diukur melalui Indikator Kinerja "Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan". Indikator ini mencerminkan sejauh mana bantuan yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh penerima untuk mendukung kegiatan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, baik dalam meningkatkan volume produksi, mutu produk, maupun kontribusi terhadap pertumbuhan usaha pengolahan di daerah. Dengan demikian, keterhubungan antara program bantuan pemerintah dengan indikator ini sangat erat, karena tingkat pemanfaatan bantuan menjadi parameter keberhasilan program dalam mendukung target strategis Direktorat Pengolahan. Realisasi indikator ini juga menjadi bagian penting dalam evaluasi efektivitas program dan penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran.

Target pemanfaatan bantuan pemerintah pada Triwulan II adalah 0%, dengan pertimbangan: Kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan persiapan awal serta belum ada pelaksanaan fisik pengadaan maupun penyaluran bantuan. Pada Triwulan II Tahun 2025 kegiatannya berfokus pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang mencakup dua jenis bantuan, yaitu: *Chest Freezer* (CF) dan Peralatan Pengolahan (PP). Kegiatan diarahkan pada penyusunan dokumen pendukung, koordinasi lintas unit, serta pelaksanaan monitoring awal untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	s.d. TW II 2025			TW II 2025	TW I 2025
Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan tahun 2025 ditargetkan mencapai 80%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat triwulanan, yang capaiannya akan diukur pada Triwulan III. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang

merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkungan Direktorat Pengolahan sebesar Rp 3.046.201.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp 88.105.400,- atau sebesar 2,89% dari pagu anggaran.

Pada pelaksanaan kegiatan di Triwulan II, terdapat beberapa kendala yang perlu diantisipasi agar tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja Dit. Pengolahan, antara lain: Proses Revisi Anggaran yang Masih Berjalan dan Usulan Kelompok Penerima yang masih berproses di mitra.

Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II 2025, adalah ketersediaan Produk di e-Katalog yang Sesuai Spesifikasi, dan koordinasi antar unit di internal Dit. Pengolahan, dengan mitra, serta pihak terkait lainnya berjalan lancar untuk menyelesaikan kendala yang muncul.

Sebagai tindak lanjut untuk Triwulan III, Direktorat Pengolahan akan melaksanakan langkah-langkah berikut:

1. Finalisasi spesifikasi teknis barang
2. Proses pengadaan barang melalui e-Katalog versi terbaru
3. Penetapan penerima manfaat dan jadwal distribusi bantuan
4. Koordinasi lanjutan dengan unit terkait untuk percepatan realisasi

Dengan demikian, diharapkan pada Triwulan III, proses penyaluran bantuan sudah mulai berjalan dan dapat berkontribusi pada peningkatan pemanfaatan bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Pengolahan.

Sebagai upaya percepatan dan penyiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Pemerintah (BP) berupa *Chest Freezer* (CF) dan Peralatan Pengolahan (PP) Tahun Anggaran 2025, Dit. Pengolahan telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendukung selama Triwulan II, antara lain:

1. Sosialisasi Bantuan Pemerintah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 secara *hybrid* bertempat di R. Rapat Tuna GMB IV dan melalui aplikasi *zoom meeting* melalui kegiatan sosialisasi BP KKP. Peserta kegiatan adalah dari semua unit kerja KKP yang akan melaksanakan BP dan para stakeholders/mitra. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan

untuk menyampaikan kebijakan, mekanisme, dan ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan BP CF dan PP. Sosialisasi ini penting untuk memastikan seluruh pihak memahami persyaratan, prosedur, dan tahapan yang harus dipenuhi, khususnya terkait usulan calon penerima bantuan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan stakeholder/mitra dapat lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen dan usulan kelompok penerima yang sesuai kriteria. Selain itu, sosialisasi juga menjadi upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

2. Penyusunan Spesifikasi Teknis *Chest Freezer* dan Peralatan Pengolahan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dengan dihadiri antara lain oleh Tenaga Ahli, PJ di lingkup Katimja Sarpras, dan perwakilan timja lingkup Dit. Pengolahan. Sebagai langkah penting sebelum proses pengadaan dilaksanakan, Dit. Pengolahan telah menyusun spesifikasi teknis untuk CF dan PP yang akan diadakan. Penyusunan spesifikasi ini bertujuan untuk memastikan peralatan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan lapangan, standar mutu, aspek keamanan, serta efisiensi penggunaannya.

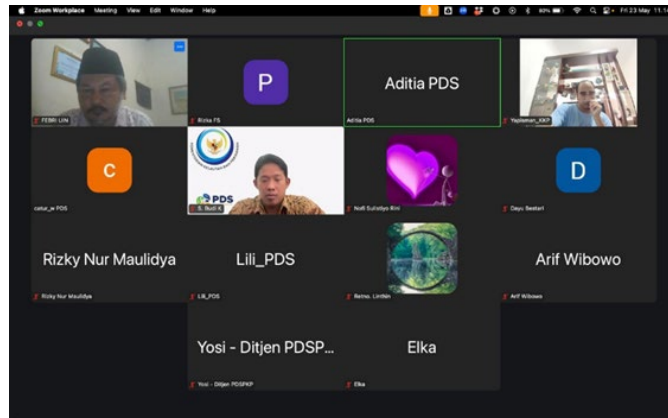
Spesifikasi teknis yang disusun juga menjadi acuan utama dalam proses pengadaan, sehingga mencegah terjadinya ketidaksesuaian produk serta menjaga akuntabilitas proses pengadaan.

3. Pencermatan pada e-Katalog Versi 6

Sebagai tindak lanjut penyusunan spesifikasi teknis, Dit. Pengolahan juga melakukan pencermatan atau penelusuran pada e-Katalog versi 6 untuk memastikan ketersediaan produk CF dan PP yang sesuai. Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan variasi produk, harga, penyedia, dan spesifikasi yang tersedia di e-Katalog. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025 secara daring dan dihadiri oleh Tim Teknis dan pelaksana di lingkup Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan.

Pencermatan ini penting untuk mengantisipasi potensi kendala teknis, seperti ketidaktersediaan produk atau ketidaksesuaian spesifikasi, sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil pencermatan, per tanggal 20 Juni 2025 di e katalog versi

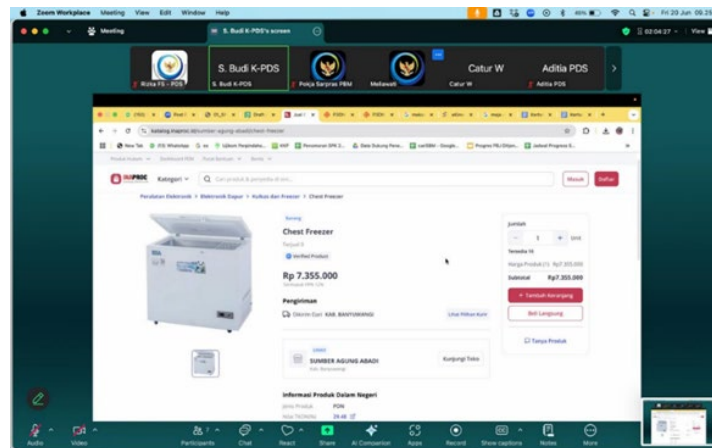
6 sudah terdapat 16 penyedia yang menawarkan spek CF sesuai dengan kebutuhan CF Dit. Pengolahan.



Gambar 33. Pencermatan pada e-Katalog Versi 6

1. Rapat Penyusunan Dokumen Pembukaan Blokir Anggaran

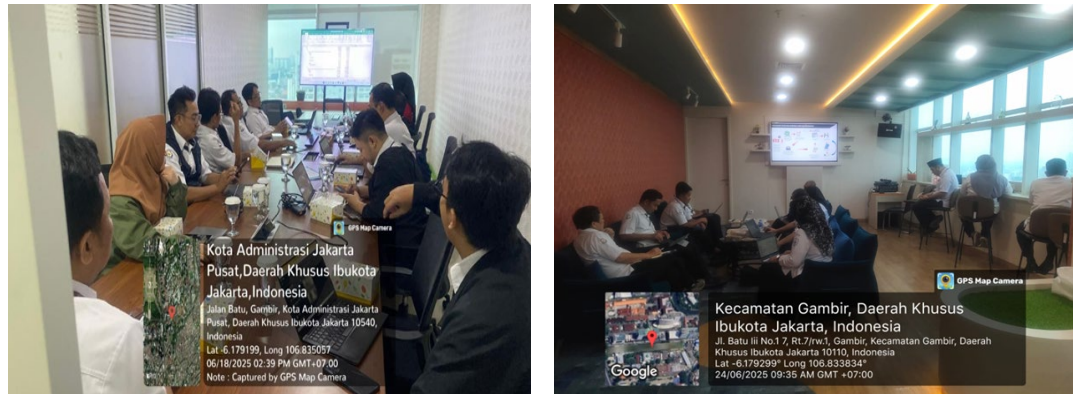
Sebagian alokasi anggaran kegiatan pengadaan BP CF dan PP masih dalam kondisi terblokir dan memerlukan kelengkapan dokumen administratif untuk proses pembukaannya. Oleh karena itu, Dit. Pengolahan telah melaksanakan rapat penyusunan dokumen pendukung untuk keperluan tersebut. Kegiatan dilaksanakan berkolaborasi dengan Timja Program Ditjen PDSPKP pada tanggal 18 Juni 2025 bertempat di R.R. Hijau Ditjen PDSPKP dan diikuti oleh semua perwakilan direktorat lingkup Ditjen PDSPKP, Inspektorat 4 Itjen KKP, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam rapat ini dibahas dan disusun dokumen seperti spesifikasi teknis, surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan, data dukung kebutuhan penerima bantuan, serta dokumen perencanaan dan jadwal kegiatan. Diharapkan melalui kegiatan ini, proses pembukaan blokir anggaran dapat segera dipenuhi, sehingga kegiatan pengadaan dapat segera dilaksanakan sesuai rencana dan target kinerja Dit. Pengolahan dapat tercapai.



Gambar 34. Rapat Penyusunan Dokumen Pembukaan Blokir Anggaran

2. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan *Chest Freezer* melalui Mekanisme E-Katalog versi 6

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 secara luring di R. Rapat Lounge Ditjen PDSPKP, dihadiri oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dit. Pengolahan, Auditor Itjen 4 KKP, perwakilan dari Biro PBJ KKP, Setditjen PDSPKP dan Timja lingkup Dit. Pengolahan. Rapat bertujuan untuk mempersiapkan penggunaan E-Katalog Versi 6. Dari hasil diskusi diperoleh informasi antara lain mengenai informasi sebagai berikut : bahwa mengacu pada Perpres PBJ Nomor 46/2025, mekanisme pengadaan B/J diutamakan melalui *e-purchasing*, baru mekanisme lainnya, mekanisme tender digunakan sebagai alternatif pilihan terakhir dalam pengadaan B/J; Pada tahun 2025 mulai digunakan e-katalog versi 6. Versi 5 sudah tidak bisa diakses. Secara umum, Versi 6 lebih user friendly. Proses pembayaran sudah masuk di aplikasi versi 6, karenanya PPK dan bendahara pengeluaran harus membuat akun pada laman katalog.inaproc.id, dimana untuk hal ini harus memakai alamat email pribadi. Mini Kompetisi (Mini Competition / Mi-Con) dan pemilihan langsung penyedia dalam e-katalog dimungkinkan dan merupakan sama-sama pilihan yang dapat dipilih oleh PPK/Pejabat pengadaan dengan didasari oleh justifikasi. Meskipun demikian, mi-con lebih disarankan untuk dipilih karena berdasarkan pengalaman, harga yang didapatkan biasanya lebih murah dan lebih transparan. Memperhatikan hasil rapat tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah Koordinasi dengan Setditjen PDSPKP terkait hasil revisi RKAK dan Koordinasi dengan para mitra untuk segera mengusulkan calon penerima BP CF.



Gambar 35. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan CF melalui Mekanisme E-Katalog versi 6

IK 6. Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah

Diversifikasi produk merupakan salah satu upaya untuk menambah nilai hasil perikanan sesuai yang diamanahkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan. Diversifikasi produk dilakukan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyesuaikan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar.

Diversifikasi produk yg dibina menuju penerapan diversifikasi produk dan / kemasan bernilai tambah kepada pelaku usaha pengolahan skala mikro, kecil dan menengah agar produk dapat diadopsi, diduplikasi direplikasi dan diproduksi untuk menambah nilai.

Persentase pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah yang telah diperkenalkan diversifikasi produk bernilai tambah, dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah diperkenalkan pada Triwulan II telah tercapai 30% dari total target tahunan, dibandingkan dengan pelaku usaha yang ditargetkan dalam rencana kerja Ditjen PDSPKP tahun 2025.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	s.d. TW II 2025			TW II 2025	TW I 2025
Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah	30	10	-	100	30	10		40	100	30	-	-

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Kinerja (IK) Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah pada Triwulan II 2025 adalah sebesar 30% atau setara 300% dengan target Triwulan I 2025 yakni 10%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka setara 30% dengan target tahun 2025 yakni 100%. Indikator Kinerja (IK) tersebut adalah bersifat triwulanan. IK tersebut pada periode yang sama di tahun 2024 bernama Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk dengan satuan UMKM. Terdapat perbedaan satuan antara Triwulan II 2025 dengan periode yang sama di tahun 2024, sehingga capaian tersebut tidak dapat dibandingkan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah sebesar Rp 252.323.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 128.074.900,- atau sebesar 50,76 % dari pagu anggaran.

Faktor Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II adalah terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan pembinaan Pelaku Usaha Diversifikasi lebih banyak dilakukan secara daring dan efektifitas kegiatan tidak optimal dikarenakan terkendala jaringan di daerah dan akses teknologi dan informasi UMKM masih minim.

Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II 2025, yaitu:

- a. Koordinasi dan sinergi kegiatan pembinaan dilakukan secara daring dan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi Vokasi di lingkungan KKP dan umum serta Penyuluh Perikanan
- b. Produk HPI sudah dapat dilakukan dengan metode dan enzim uji coba factory trial dengan kadar protein 26,86 % (malto 20%) dan 41,52% (Malto 10%).
- c. Perbaikan peralatan *centrifuge* telah dilakukan pada bulan mei 2025 sehingga sudah dapat dioperasikan.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya, yaitu :

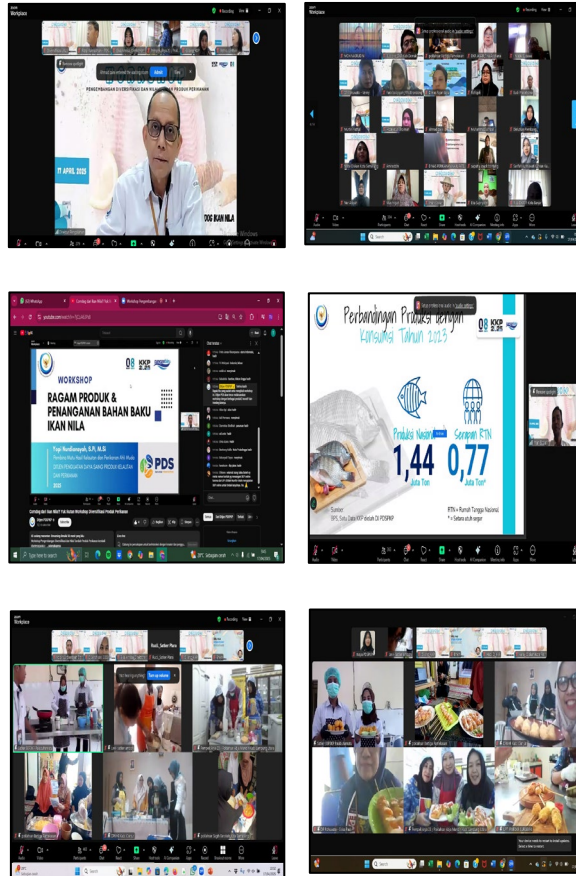
- a. Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Diversifikasi Produk Bernilai Tambah melalui Workshop/Sosialisasi/Webinar secara daring
- b. Direktorat Pengolahan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/kab/kota, akademisi, lingkup perikanan, asosiasi dan mitra terkait untuk kolaborasi kegiatan. untuk Dinas KP Provinsi/Kab/Kota disarankan untuk mengadopsi kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat menganggarkan kegiatan di instansi masing-masing
- c. Direktorat Pengolahan telah menyampaikan surat pemberitahuan ke Dinas Perikanan Kota Pekalongan bahwa UPI nilai tambah Pekalongan sudah bisa melakukan produksi.
- d. Direktorat Pengolahan telah menyampaikan Manual peralatan dan alur proses UPI HPI Pekalongan melalui Dinas Perikanan kota Pekalongan
- e. Direktorat Pengolahan menyampaikan surat rekomendasi agar penerima bantuan UPI HPI Pekalongan dapat segera mengoperasional bantuan dimaksud
- f. Direktorat Pengolahan melakukan pengenalan produk HPI kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur sebagai bahan baku fortifikasi yang dapat ditambahkan pada pangan dalam rangka mengantisipasi stunting di kutai timur. Diharapkan kedepan dapat dilakukan Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan UPI HPI Pekalongan dalam memanfaatkan fortifikasi HPI tersebut dalam mengatasi Stunting.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan

a. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk

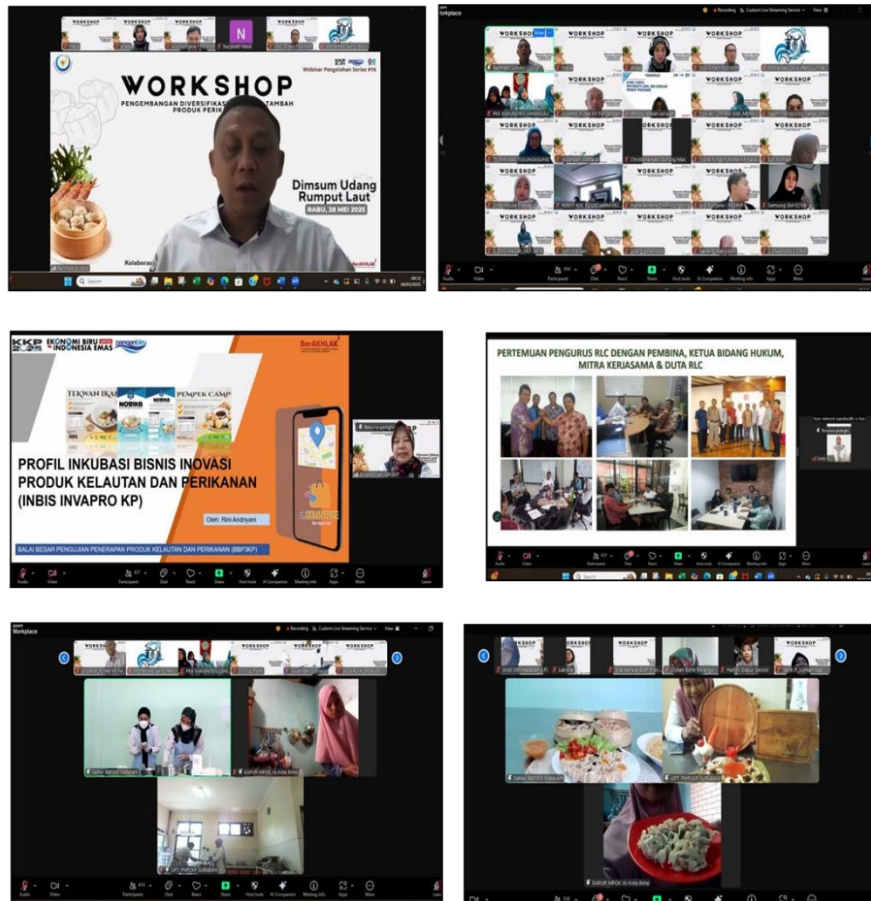
Perikanan edisi *Corndog* Ikan Nila dilaksanakan pada 17 April 2025 secara *hybrid*, offline di BBP3KP Satker Palabuhanratu dan online melalui *Zoom Meeting*. Peserta terdiri dari 460 orang melalui Zoom dan 65 orang melalui *livestream YouTube*, berasal dari berbagai provinsi. Tujuan kegiatan adalah mendukung agenda nasional dan meningkatkan pengetahuan tentang diversifikasi produk perikanan. Materi mencakup strategi pemasaran olahan ikan nila dan praktek pengolahan *corndog*. Tindak lanjut yang diperlukan mencakup workshop selanjutnya tentang *pizza* udang pada 30 April 2025 dan melakukan pemantauan serta evaluasi berkala untuk pembinaan diversifikasi produk kelautan. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi *Pizza* Udang dilaksanakan pada 30 April 2025 secara *hybrid*, dengan 307 peserta melalui Zoom dan 57 melalui *livestream YouTube* dari berbagai daerah. Tujuan acara ini adalah mendukung agenda nasional dan penguatan ekonomi biru melalui pangan biru yang sehat dan berkelanjutan. Materi yang dibahas mencakup ragam produk udang dan akses permodalan, serta praktek pengolahan cendol rumput laut. Tindak lanjut mencakup pelaksanaan workshop berikutnya pada Mei 2025 dan pemantauan berkala untuk evaluasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan.



Gambar 36. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Corndog Ikan Nila

- b. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Burger Ikan Cakalang** diadakan pada 20 Mei 2025 secara online melalui Zoom dan YouTube, diikuti oleh 941 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi produk perikanan, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam diversifikasi produk. Materi yang dibahas meliputi strategi pemasaran, pengemasan, dan praktik pengolahan burger cakalang. Tindak lanjutnya mencakup workshop selanjutnya tentang pembuatan Dimsum udang Rumput laut pada 28 Mei 2025, dan evaluasi berkala sebagai data pendukung dalam pembinaan produk kelautan dan perikanan.
- c. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Dimsum Udang Rumput Laut** dilaksanakan pada 28 Mei 2025 secara *hybrid*, dengan 490 peserta, terdiri dari 438 online dan 52 melalui

YouTube. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung agenda nasional dan mendorong perekonomian masyarakat pesisir melalui inovasi produk kelautan. Materi yang dibahas meliputi strategi pengembangan rumput laut dan praktek pengolahan dimsum udang rumput laut. Tindak lanjut mencakup kegiatan lebih interaktif dengan UMKM dan pemantauan evaluasi untuk diversifikasi produk kelautan dan perikanan.

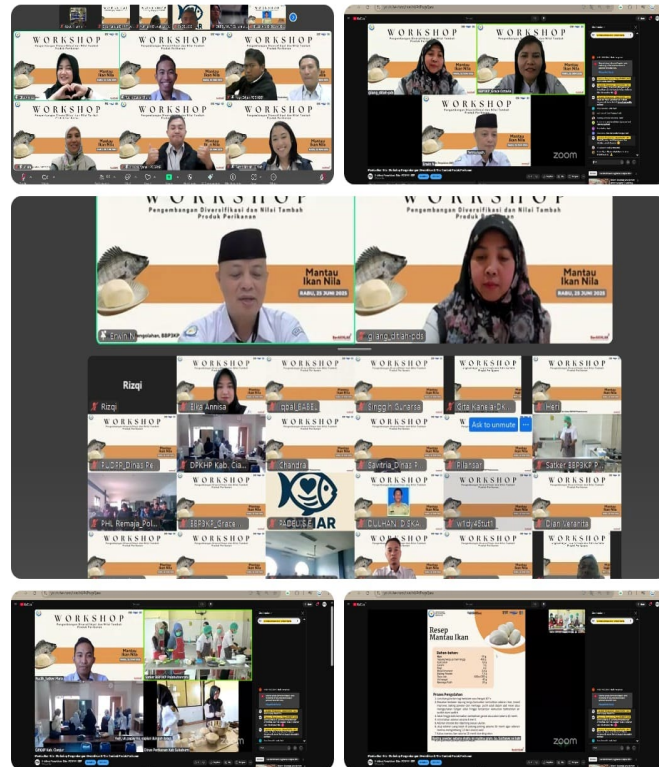


Gambar 37. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Dimsum Udang Rumput Laut

d. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Es Cream Rumput Laut dilaksanakan pada 18 Juni 2025, secara *hybrid* di BBP3KP Palabuhanratu dan online melalui Zoom. Peserta mencapai 522, terdiri dari 478 peserta lewat Zoom dan 46 lewat livestream YouTube, berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman tentang diversifikasi produk rumput laut, khususnya es krim, untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dan pelaku usaha. Materi

mencakup inovasi produk dan akses pemasaran. Praktek pengolahan es krim rumput laut diikuti oleh tujuh kelompok dari berbagai dinas dan lembaga. Tindak lanjut termasuk penyelenggaraan workshop berikutnya pada 26 Juni 2025 dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

- e. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi Mantao Ikan Nila** diadakan pada 25 Juni 2025 secara *hybrid* di BBP3KP Palabuhanratu dan secara online melalui Zoom. Kegiatan ini dihadiri oleh 362 peserta, termasuk 478 orang melalui Zoom dan 22 orang melalui YouTube, dari berbagai provinsi dan lembaga pendidikan terkait perikanan. Tujuan workshop adalah memberikan pemahaman teknis tentang diversifikasi produk ikan nila, terutama pengolahan menjadi produk mantau yang inovatif. Materi yang dibahas mencakup penerapan standar pengolahan ikan dan inovasi dalam pengolahan. Peserta juga mengikuti praktek pengolahan es krim rumput laut secara kelompok dari lokasi masing-masing. Tindak lanjut kegiatan mencakup rencana pelaksanaan workshop berikutnya pada Juli 2025 dan pemantauan rutin untuk evaluasi. Kesimpulannya, peserta sangat antusias dan memanfaatkan bahan yang mudah didapat untuk praktek, sehingga dapat meningkatkan pengembangan produk di daerah masing-masing.



Gambar 38. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi Mantau Ikan Nila

2. Sosialisasi Pengolahan Hasil Laut

Sosialisasi Pengolahan Hasil Laut diadakan pada 19 Juni 2025 di Klenteng Tjoe Soe Kong, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini diikuti oleh 572 peserta dari berbagai kelompok, termasuk TNI AL dan masyarakat lokal. Tujuan sosialisasi adalah memberikan pemahaman tentang pengembangan produk olahan hasil laut yang berkualitas. Dalam acara ini, peserta belajar pengolahan ekado ikan tenggiri. Diharapkan sosialisasi ini dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan gizi anak, untuk membangun generasi yang sehat dan cerdas.



Gambar 39. Sosialisasi Pengolahan Hasil Laut

3. Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan

Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada 12 Juni 2025 di Aula Ds. Ciantra, Cikarang Selatan, diikuti oleh 35 peserta dari TP PKK dan kader posyandu. Tujuan pelatihan adalah memperkenalkan diversifikasi produk perikanan. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya menjaga mutu produk perikanan dan praktik diversifikasi. Direktorat Pengolahan akan terus mendukung pemerintah daerah agar pelatihan ini diterapkan dalam program pemberian makanan tambahan dan usaha kelompok.



Gambar 40. Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan

4. *Factory Trial* Produk HPI di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan

Kegiatan *Factory Trial* Produk HPI dilakukan di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan dari tanggal 22 hingga 25 April 2025. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguji skala pabrik. Pada tanggal 23 April, diadakan audiensi dengan Walikota Pekalongan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, di mana disepakati Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk mengoperasikan UPI Nilai Tambah dan mencari mitra swasta untuk optimalisasi operasional. Pada 24 April, dilakukan *factory trial* pembuatan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) dengan bahan baku ikan selar yang mudah diperoleh dan terjangkau. Metode pembuatan diambil dari hasil uji coba sebelumnya, dengan target memenuhi standar SNI 9295:2025. Hasil pengujian menunjukkan parameter sensori serta kadar protein dan lemak sudah sesuai dengan persyaratan. Namun, terdapat kendala pada alat sentrifuge yang tidak berfungsi optimal, sehingga proses dilakukan secara manual. Direktorat Pengolahan akan berkoordinasi dengan Pemkot Pekalongan terkait pengelola, dengan batas waktu FHO dan penerbitan BAST. Hasil uji HPI sudah memenuhi standar, dan perbaikan alat sentrifuge sedang dilakukan oleh PT. Sarana Sentra Inovasi (SSI) dengan pengawasan dari Direktorat Pengolahan.



Gambar 41. *Factory Trial* Produk HPI di UPI Nilai
Tambah Kota Pekalongan

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit kerja Direktorat Pengolahan sampai dengan waktu pengukuran.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	s.d. TW II 2025			TW II 2025	TW I 2025
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	95	95	80	95	100	100	100	100	105	105	-	-

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%) tahun 2025 ditargetkan sebesar 95% sedangkan target Triwulan II adalah sebesar 95%. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2024 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025. Perhitungannya adalah triwulanan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%) pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% atau setara 105,00% dengan target Triwulan II 2025 yakni 95%, dan setara dengan 105,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni 95%. Capaian pada triwulan II 2025 sama dengan capaian di Triwulan I 2025 dan di Triwulan II 2024 yakni 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada Triwulan II 2025, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan

Jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Pengolahan Tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti dibanding jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Pengolahan Tahun 2024.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	s.d. TW II 2025			TW II 2025	TW I 2025
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-

Penilaian indikator ini dilakukan pada triwulan IV 2025 dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya persamaan antara target tahun 2024 dengan tahun 2024 yaitu 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan I antara lain:

1. Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 9. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat

kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2025, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	s.d. TW II 2025			TW II 2025	TW I 2025
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkungan Direktorat Pengolahan pada Triwulan II antara lain:

- 1. Sosialisasi Bantuan Pemerintah**, dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 secara *hybrid* bertempat di R. Rapat Tuna GMB IV dan melalui aplikasi zoom melalui kegiatan sosialisasi BP KKP. Peserta kegiatan adalah dari semua unit kerja KKP yang akan melaksanakan BP dan para stakeholders/mitra. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk menyampaikan kebijakan, mekanisme, dan ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan BP *Chest Freezer* dan Peralatan Pengolahan.
- 2. Penyusunan Spesifikasi Teknis *Chest Freezer* dan Peralatan Pengolahan**, dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dengan dihadiri

antara lain oleh Tenaga Ahli, PJ di lingkup Katimja Sarpras, dan perwakilan timja lingkup Dit. Pengolahan. Sebagai langkah penting sebelum proses pengadaan dilaksanakan, Dit. Pengolahan telah menyusun spesifikasi teknis untuk CF dan PP yang akan diadakan. Penyusunan spesifikasi ini bertujuan untuk memastikan peralatan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan lapangan, standar mutu, aspek keamanan, serta efisiensi penggunaannya.

3. **Pencermatan pada e-Katalog Versi 6**, dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025 secara daring dan dihadiri oleh Tim Teknis dan pelaksana di lingkup Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan. Pencermatan ini penting untuk mengantisipasi potensi kendala teknis, seperti ketidaktersediaan produk atau ketidaksesuaian spesifikasi, sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil pencermatan, per tanggal 20 Juni 2025 di e katalog versi 6 sudah terdapat 16 penyedia yang menawarkan spek CF sesuai dengan kebutuhan CF Dit. Pengolahan.
4. **Rapat Penyusunan Dokumen Pembukaan Blokir Anggaran**, dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat Hijau Ditjen PDSPKP dan diikuti oleh semua perwakilan eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP, Inspektorat 4 Itjen KKP, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam rapat ini dibahas dan disusun dokumen seperti spesifikasi teknis, surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan, data dukung kebutuhan penerima bantuan, serta dokumen perencanaan dan jadwal kegiatan. Diharapkan melalui kegiatan ini, proses pembukaan blokir anggaran dapat segera dipenuhi, sehingga kegiatan pengadaan dapat segera dilaksanakan sesuai rencana dan target kinerja Dit. Pengolahan dapat tercapai.
5. **Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan CF melalui Mekanisme E Katalog versi 6**, dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 secara luring di R. Rapat Lounge Ditjen PDSPKP, dihadiri oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dit. Pengolahan, Auditor Itjen 4 KKP, perwakilan dari Biro PBJ KKP, Setditjen PDSPKP dan Timja lingkup Dit. Pengolahan. Rapat bertujuan untuk mempersiapkan penggunaan E-Katalog Versi 6.

IK 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	s.d. TW II 2025			TW II 2025	TW I 2025
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Pengolahan sebesar 86, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. Adanya peningkatan target tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar 2 poin atau meningkat 2,38% dari target tahun 2024.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada Triwulan II antara lain:

1. Pengukuran dan verifikasi Capaian Kinerja organisasi lingkup Ditjen PDSPKP Periode I Tahun anggaran 2025, dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025.

2. Pengisian capaian kinerja individu Triwulan I, dilaksanakan pada tanggal 14 April 2025.
3. Pelaporan Kinerja lingkup Lingkup Ditjen PDSPKP periode Triwulan I tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025.
4. Pembahasan Review laporan kinerja level I dan II, dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025.

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II 2025	% Realisasi s.d. TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	s.d. TW II 2025			TW II 2025	TW I 2025
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	82		78	87	84,23		86,44	84,23	103	97	-	-

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan tahun 2025 ditargetkan sebesar 87 sedangkan target semester I adalah sebesar 82. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2024 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Perhitungannya adalah semesteran, capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengolahan pada semester I tahun 2025 adalah 84,23. Capaian ini setara dengan 103,00% terhadap target semester I tahun 2024 yakni 82 atau setara

107,99% terhadap target semester I tahun 2024 yakni 78. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 87, maka capaian semester I tahun 2025 telah mencapai 97,00%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan pada semester I antara lain:

1. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
2. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dari April sampai dengan Juni 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerja pada Triwulan I sebesar 107,25. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2025 adanya kenaikan 2,16 poin atau 2,05%, dan jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 4,26 poin atau 4,13%. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan II diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%); target 68,70 %; capaian 74,27% atau 108,11%.
- IKK Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%); target 50%; capaian 50% atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (%); target 10%; capaian 14,83% atau 120,00% dari target.
- IKK Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton); target 1,67%; capaian 1,95% atau 120,00%.
- IKK Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (%); target 30%; capaian 30% atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 95%; capaian 100% atau 105,26% dari target.
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan; target 82%; capaian 84,23% atau 102,72%.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

4.2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pada triwulan II 2025, yaitu:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Produksi Kelautan Perikanan Olahan dan	• Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi UPI yang diperlukan sebagai dasar untuk penetapan populasi, baik dari segi waktu dan kelengkapan datanya • Terdapat perbedaan format data yang diperoleh dari instansi terkait, sehingga perlu waktu untuk melakukan cleansing data	• Penetapan kerangka sample untuk penghitungan VPO dan Utilitas UPI MB • Perlu ditingkatkan koordinasi dengan BPPMHKP dan lintas K/L dalam pelaksanaan kegiatan dan perolehan data

4.3. Permasalahan

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 yang telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2025	Tindak Lanjut
• Perlu sinergitas dan koordinasi berkala dengan BKI dan BBPMHKP untuk perolehan data lalu lintas ikan sebagai sumber data volume produk olahan Tahun 2025. • Review ulang terkait usulan kerangka sampling setelah penerapan efisiensi anggaran.	• Mengirimkan surat perihal, permohonan data lalu lintas domestik dan ekspor triwulan II Tahun 2025 kepada Badan Karantina Indonesia • Melaksanakan penetapan populasi Volume Produk Olahan (VPO) dan cleansing data Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar (UPI MB)

Bukti tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tautan SAKIP dengan folder Level 2 PBM (https://drive.google.com/drive/folders/1qWSv4JE5PhuEBLjYVa6fW8DK5FqH_ddf).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terka hit sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbn@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

4.4. Lampiran



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAR www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGOLAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widya Rusyanto**
Jabatan : Direktur Pengolahan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Direktur Pengolahan

Widya Rusyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGOLAHAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,7
		2.	Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (Persen)	100
		3.	Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina Menuju Penerapan Kelayakan Pengolahan dan/atau HACCP (Persen)	100
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	4.	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton)	3,71
		5.	Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	80
		6.	Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Produk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen)	100
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	81
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	87

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	16.829.050.000
Total Anggaran Direktorat Pengolahan Tahun 2025	16.829.050.000

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Direktur Pengolahan



Widya Rusyanto